

Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali 2011





KATALOG BPS : 2101010.51

**STATISTIK DEMOGRAFI
DAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA
PROVINSI BALI
2011**

<http://bali.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali 2011

No. Publikasi : 51520.1201

Katalog BPS : 4101001.51

Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm

Jumlah Halaman : 62 + vi Halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:

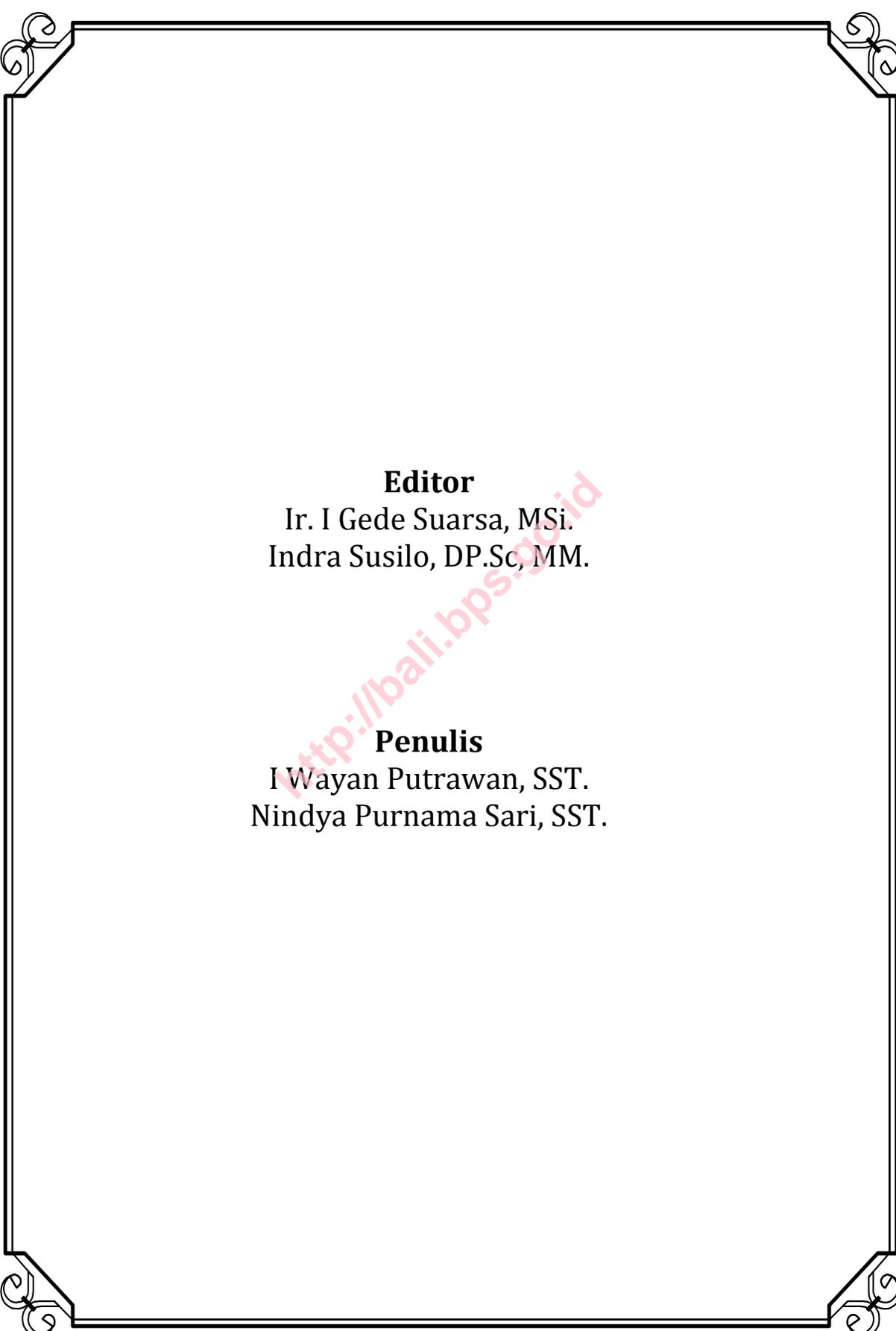
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Catatan:

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



Editor

Ir. I Gede Suarsa, MSi.
Indra Susilo, DP.Sc, MM.

Penulis

I Wayan Putrawan, SST.
Nindya Purnama Sari, SST.

KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali 2011” ini memberikan informasi tentang keadaan kependudukan, kelahiran, kematian, migrasi dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Informasi yang diulas berkaitan dengan kondisi tahun 2011 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Sumber data utama penyusunan publikasi ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011 dan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang didukung dengan data Sensus Penduduk (SP) sebelumnya. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi para peneliti, pengambil kebijakan maupun pihak lain yang membutuhkan, serta bermanfaat untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kelemahan dalam publikasi ini, namun demikian selalu diusahakan adanya penyempurnaan dan perbaikan untuk dapat memberikan informasi yang lengkap dan *up to date*. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian publikasi ini kami sampaikan terima kasih, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Denpasar, September 2012
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Kepala,

Ir. I GDE SUARSA, M.Si
NIP. 19550628 197903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	2
1.3. Sumber Data	3
1.4. Metodologi	3
1.4.1. Kerangka Sampel	4
1.4.2. Rancangan Sampel	4
1.4.3. Metode Pengumpulan data	4
1.4.4. Pengolahan Data	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II KEPENDUDUKAN	10
2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	12
2.2. Sebaran Penduduk	14
2.3. Kepadatan Penduduk	14
2.4. Komposisi Penduduk	15
2.4.1. Struktur Umur	16
2.4.2. Piramida Penduduk	17
2.4.3. Umur Median	20
2.4.4. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	22
2.4.5. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	23
2.4.6. Status Perkawinan	25
2.4.7. Status dalam Rumah Tangga	26
BAB III FERTILITAS	28
3.1. Rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH)/ <i>Child Ever Born</i> (CEB)	29
3.2. Rasio Anak-Ibu (<i>Child Woman Ratio/CWR</i>)	31

3.3.	Umur Perkawinan Pertama	32
3.4.	Lama dalam Ikatan Perkawinan	34
3.5.	Keluarga Berencana (KB)	37
3.6.	Pendidikan Wanita Pernah Kawin	37
BAB IV	MORTALITAS	39
4.1.	Penolong Pertama Kelahiran	40
4.2.	Imunisasi Balita	41
4.3.	Pemberian Air Susu Ibu	43
4.4.	Kesehatan Wanita Usia Subur	43
BAB V	SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA	43
5.1.	Profil Rumah Tangga	44
	5.1.1. Persebaran Rumah Tangga	46
	5.1.2. Jumlah Anggota Rumah Tangga	46
5.2.	Profil Kepala Rumah Tangga	48
	5.2.1. Jenis Kelamin	49
	5.2.2. Pendidikan	50
	5.2.3. Kegiatan Utama	50
5.3.	Perumahan	51
	5.3.1. Status Kepemilikan Rumah	53
	5.3.2. Lantai, Atap dan Dinding	55
	5.3.3. Sumber Air Minum	56
	5.3.4. Fasilitas Tempat Buang Air Besar	57
	5.3.5. Sumber Penerangan	58
	5.3.6. Akses Terhadap Teknologi, Informasi dan Komunikasi	60
	5.3.7. Bahan Bakar Utama	60
BAB VI	PENUTUP	61
6.1.	Kesimpulan	
6.2.	Saran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Bali Tahun 1961 – 2011...	8
Tabel 2.2.	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 1980 – 2011	10
Tabel 2.3.	Jumlah dan Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011.....	12
Tabel 2.4.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011 (persentase)	15
Tabel 2.5.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan, Provinsi Bali Tahun 2009 - 2011	18
Tabel 2.6.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan, Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011..	19
Tabel 2.7.	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011	21
Tabel 2.8.	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/kota dan Rasio Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011	21
Tabel 3.1.	Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Kelompok Umur Wanita, Provinsi Bali Tahun 2009 –2011	27
Tabel 3.2.	Jumlah Balita Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011	27
Tabel 3.3.	Rasio Anak-Ibu Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2009 –2011	28
Tabel 4.1.	Persentase Balita Usia 2 - 4 Tahun yang Menyusui Serta Rata-rata Lamanya Menyusui Menurut Wilayah dan Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2009 –2011	41
Tabel 5.1.	Persentase Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011	47
Tabel 5.2.	Indikator TIK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan, Provinsi Bali Tahun 1961 – 2011	9
Gambar 2.2.	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Bali Tahun 2011	11
Gambar 2.3.	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011	13
Gambar 2.4.	Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011	16
Gambar 2.5.	Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011	22
Gambar 2.6.	Persentase Penduduk Menurut Status dalam Rumah Tangga, Provinsi Bali Tahun 2011	23
Gambar 3.1.	Persentase Wanita Usia Subur Menurut Umur Saat Perkawinan Pertama, Provinsi Bali Tahun 2011	29
Gambar 3.2.	Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Wanita Usia Subur Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011	31
Gambar 3.3.	Persentase Wanita Usia Subur Menurut Lama Tahun dalam Perkawinan, Provinsi Bali Tahun 2011	31
Gambar 3.4.	Rata-rata Lama Wanita Usia Subur dalam Ikatan Perkawinan, Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011	32
Gambar 3.5.	Persentase Wanita Usia Subur Pernah Kawin Menurut Keikutsertaan KB Dan Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011	33
Gambar 3.6.	Partisipasi KB Wanita Pernah Kawin Kelompok Umur Subur Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011	34
Gambar 3.7.	Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Tingkat Pendidikan Wanita Usia Subur Pernah Kawin, Provinsi Bali Tahun 2011	35
Gambar 3.8.	Rata-rata Anak Lahir Hidup Wanita Usia Subur Pernah Kawin Menurut Wilayah dan Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011 ...	36
Gambar 4.1.	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran dan Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011	38

Gambar 4.2.	Persentase Balita yang Belum Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi Dan Wilayah, Provinsi Bali Tahun 2011	39
Gambar 4.3.	Persentase Wanita Usia Subur yang Memiliki Keluhan Kesehatan Dalam Sebulan Yang Lalu Menurut Wilayah dan Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011	42
Gambar 5.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Bali Tahun 2011	44
Gambar 5.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga, Provinsi Bali Tahun 2011	45
Gambar 5.3.	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011	47
Gambar 5.4.	Persentase Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga, Provinsi Bali Tahun 2011	48
Gambar 5.5.	Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011	49
Gambar 5.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, Provinsi Bali Tahun 2011	50
Gambar 5.7.	Rata-rata Luas Lantai Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011	51
Gambar 5.8.	Persentase Bangunan Tempat Tinggal Menurut Jenis Lantai, Provinsi Bali Tahun 2011	52
Gambar 5.9.	Persentase Jenis Atap Beton/Genteng, Jenis Dinding Tembok Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011	53
Gambar 5.10.	Persentase Sumber Air Minum Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011	54
Gambar 5.11.	Persentase Rumah Tangga Menurut Ketersediaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Provinsi Bali Tahun 2011	55
Gambar 5.12.	Persentase Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak, Provinsi Bali Tahun 2011	58

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Tugas pokok pemerintah adalah berusaha mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui proses pembangunan. Pembangunan nasional pada dasarnya menempatkan penduduk sebagai inti dari pembangunan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas penduduk, sehingga memerlukan peran aktif dari penduduk itu sendiri. Penduduk selain menjadi objek pembangunan juga berperan sebagai subjek pembangunan. Tanpa adanya peran serta penduduk, tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera akan sulit tercapai.

Penduduk menempati posisi penting dalam proses pembangunan. Namun demikian, pengelolaan penduduk yang kurang baik justru akan menjadikannya beban dalam pembangunan. Faktor-faktor penentu pertumbuhan penduduk adalah kelahiran (*fertility*), kematian (*mortality*), migrasi masuk (*in-migration*), dan migrasi keluar (*out-migration*). Melalui pengelolaan pengendalian jumlah penduduk, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lancar. Dinamika kependudukan terkait erat dengan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk yang besar memerlukan berbagai fasilitas pendukung yang pada gilirannya memerlukan investasi dalam menciptakan sarana dan prasarana yang memadai seperti perumahan, sarana pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dicerminkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga sebagai unit terkecil dalam kelompok masyarakat. Keadaan sosial ekonomi tersebut antara lain ukuran rumah tangga, kondisi perumahan, perkembangan rumah tangga miskin, pengeluaran, dan akses teknologi informasi. Sehingga untuk dapat mengendalikan jumlah penduduk, serta meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk, diperlukan pengetahuan dan informasi yang lengkap mengenai gambaran dinamika kependudukan, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga di suatu daerah pada periode tertentu.

Perencanaan program yang matang, serta dapat mengakomodasikan tingkat kebutuhan masyarakat, dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk. Disamping itu, perlu dilakukan evaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai untuk mengetahui apakah

sesuai dengan sasaran yang diinginkan atau tidak. Dengan demikian, peran data dan statistik dirasakan penting, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan utama diterbitkannya publikasi Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali Tahun 2011 ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai dinamika kependudukan di Provinsi Bali termasuk kondisi sosial dan ekonomi penduduknya. Secara spesifik penyusunan publikasi ini memiliki 3 tujuan yaitu:

- a. Menyediakan data statistik berupa gambaran kependudukan Provinsi Bali.
- b. Menyediakan data dasar karakteristik sosial ekonomi rumah tangga Provinsi Bali.
- c. Memberikan informasi sebagai evaluasi sekaligus perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam bidang kependudukan.

1.3. Sumber Data

Sebagian besar data yang disajikan pada publikasi Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali Tahun 2011 ini menggunakan data yang bersumber dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Selain itu, untuk menunjang penyusunan publikasi ini, digunakan data yang bersumber dari data hasil kegiatan pengumpulan BPS lainnya, seperti Sensus Penduduk (SP), serta beberapa publikasi BPS lainnya sebagai data pendukung. Data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas 2011 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi Bali.

1.4. Metodologi

Publikasi Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali Tahun 2011 sebagian besar menggunakan data yang bersumber dari kegiatan Susenas Tahun 2011. Pelaksanaan Susenas Tahun 2011 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan 97 Kab/Kota di Indonesia, di mana setiap triwulan akan didistribusikan sebanyak 75.000 ruta. Pada Tahun 2011, di Provinsi Bali Susenas dilaksanakan di 576 sampel Blok Sensus (BS) dengan sampel rumah tangga sebanyak 5.760 rumah tangga. Ke 576 sampel BS ini terbagi ke dalam empat triwulan dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Angka estimasi provinsi didapat dari data hasil pencacahan untuk setiap triwulannya, untuk penyajian sampai dengan tingkat kabupaten/kota diperoleh

dari kumulatif pelaksanaan pencacahan selama empat triwulan. Beberapa jenis data yang dikumpulkan pada Susenas Tahun 2011 antara lain, keterangan anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, teknologi, komunikasi dan informasi, serta keterangan sosial ekonomi lainnya.

1.4.1. Kerangka Sampel

Terdapat dua jenis kerangka sampel yang digunakan dalam Susenas 2011, yaitu kerangka sampel primer (*primary sampling unit*) dan kerangka sampel sekunder (*secondary sampling unit*). Kerangka sampel primer adalah daftar blok sensus (BS) biasa hasil pemetaan SP 2010, sedangkan kerangka sampel sekunder adalah daftar rumah tangga biasa hasil pemutakhiran rumah tangga SP2010-C1 dengan menggunakan daftar VSEN11-P. Ukuran sampel rumah tangga yang dipilih di setiap blok sensus berjumlah 10 rumah tangga. Pemilihan sampel rumah tangga dilakukan ketika proses pemutakhiran rumah tangga dengan daftar VSEN11.P telah selesai dilakukan.

1.4.2. Rancangan Sampel

Penarikan sampel Susenas Tahun 2011 dilakukan dengan menggunakan rancangan penarikan sampel berstrata dua tahap. Strata yang digunakan dalam penarikan sampel Susenas 2011 adalah klasifikasi desa/kelurahan, yaitu: desa/kelurahan perkotaan (*urban*) dan desa/kelurahan perdesaan (*rural*). Penarikan sampel antar strata dilakukan secara terpisah (*independent*) proporsional sesuai dengan size masing-masing strata. Ukuran sampel triwulanan yang telah ditetapkan ditujukan untuk estimasi tingkat provinsi, sedangkan dari kumulatif pelaksanaan pencacahan selama empat triwulan ditujukan untuk estimasi tingkat kabupaten/kota.

Tahapan penarikan sampel Susenas 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, memilih n_h blok sensus dari N_h secara pps (*probability proportional to size*) dengan size banyaknya rumah tangga.
- b. Tahap kedua, memilih sepuluh rumah tangga biasa pada setiap blok sensus terpilih secara sistematis berdasarkan hasil pemutakhiran rumah tangga SP2010-C1 dengan menggunakan daftar VSEN11-P. Seluruh rumah tangga sampel Susenas Tahun 2011 dicacah dengan kuesioner Kor (daftar VSEN2011.K) dan kuesioner Modul (daftar VSEN2011.M).

1.4.3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Wawancara dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama menanyakan keterangan keberadaan rumah tangga dan pendidikan kepala rumah tangga untuk keperluan pemutakhiran kerangka sampel rumah tangga, dan tahap kedua menanyakan keterangan tentang rumah tangga dan anggota rumah tangga. Keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik rumah tangga. Sedangkan keterangan anggota rumah tangga diusahakan dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota rumah tangga yang bersangkutan yang menjadi responden.

1.4.4. Pengolahan Data

Pengolahan data dimulai dari tahap perekaman data (*data entry*), pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner (*validation*) sampai dengan tabulasi yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum dilakukan perekaman data, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, pemberian kode (*coding*) serta penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar.

1.5. Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali Tahun 2011 ini terbatas hanya sampai menampilkan informasi-informasi yang terkait dengan kependudukan dan sosial ekonomi rumah tangga. Informasi lain, seperti pendidikan, kesehatan, konsumsi, dan ketenagakerjaan disajikan dalam publikasi tersendiri. Penyajian publikasi ini diuraikan dalam tujuh bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, tujuan, sumber data dan metodologi, serta sistematika penulisan.
- BAB II KEPENDUDUKAN, meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran penduduk, kepadatan penduduk, struktur umur, piramida penduduk, rasio ketergantungan, rasio jenis kelamin, status perkawinan, serta status dalam rumah tangga.
- BAB III FERTILITAS, meliputi indikator-indikator yang berkaitan dengan fertilitas, antara lain rata-rata anak lahir hidup, rasio anak-ibu, umur perkawinan pertama, lama dalam ikatan perkawinan, keluarga berencana, serta tingkat pendidikan wanita pernah kawin.

- BAB IV MORTALITAS, meliputi indikator-indikator yang berkaitan dengan mortalitas, antara lain penolong pertama kelahiran, imunisasi balita, pemberian air susu ibu, serta kesehatan wanita usia subur.
- BAB V SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA, meliputi karakteristik sosial ekonomi, perumahan dan akses teknologi informasi rumah tangga.
- BAB VI PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.

<http://bali.bps.go.id>

BAB II

KEPENDUDUKAN



Tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera diperlukan peran serta aktif dari seluruh penduduk. Penduduk merupakan salah satu sumber daya yang paling penting dibutuhkan dalam proses pembangunan. Posisinya sebagai objek sekaligus subjek pembangunan menjadikannya sebagai modal dasar pembangunan. Posisinya yang penting ini selain dapat mendukung proses pembangunan juga dapat menjadikannya sumber permasalahan. Pengelolaan penduduk yang kurang baik akan berakibat pada perannya terhadap pembangunan, penduduk justru akan menjadi beban pembangunan.

Semakin banyak penduduk dapat berarti sebagai semakin meningkatnya jumlah pelaku pembangunan, sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas output pembangunan. Namun pada kenyataannya jumlah penduduk yang banyak tidak secara serta merta menjadikannya keunggulan dalam pembangunan ketika peningkatan kuantitas penduduk tidak diikuti oleh peningkatan kualitas. Bahkan pada kondisi dimana kuantitas penduduk mengalami peningkatan yang tajam tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk justru akan menjadikan penduduk sebagai beban pembangunan. Hal inilah yang mendorong upaya peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Masalah-masalah kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk perlu menjadi fokus perhatian utama dalam pembangunan. Penduduk dengan kuantitas yang cukup besar dan dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, serta persebaran tidak merata, apabila tidak diatur, dikendalikan dan diarahkan akan menjadi "*baby boom*" di tahun-tahun mendatang, sehingga akan menambah beban bagi pemerintah. Melalui pengendalian pertumbuhan, pengaturan persebaran, serta peningkatan kualitas penduduk diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata

Di Indonesia pembangunan kependudukan masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk kurangnya perhatian terhadap aspek kependudukan terlihat dari terjadinya ledakan penduduk pada tahun 60-70-an.

Pembangunan kependudukan adalah suatu upaya transisi demografis yang ditujukan pada tingkat kelahiran dan kematian yang lebih rendah. Hal ini berarti, kuantitas penduduk tumbuh secara lebih efisien, namun menghasilkan kualitas manusia yang lebih tinggi. Salah satu upaya pembangunan kuantitas kependudukan yang sangat kita kenal adalah program Keluarga Berencana (KB). Sementara, pembangunan kualitas kependudukan dilakukan melalui berbagai program yang mengiringi KB secara paralel, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Wajib Belajar, dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sinergi kuantitas dan kualitas kependudukan ini dahulu terangkum dalam tema Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).

2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk adalah indikator kependudukan yang menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan berimplikasi pada jumlah kebutuhan dasar penduduk, yang pada nantinya mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Berdasarkan informasi mengenai laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk pada masa yang akan datang dapat didekati, sehingga banyaknya kebutuhan dasar penduduk dapat diperkirakan.

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu kelahiran (*fertility*), kematian (*mortality*), perpindahan penduduk masuk (*in-migration*), dan perpindahan penduduk keluar (*out-migration*). Selisih antara kelahiran dan kematian sering disebut sebagai pertumbuhan alamiah (*natural increase*), sedangkan selisih antara perpindahan penduduk keluar dan perpindahan penduduk masuk disebut migrasi neto (*net migration*). Sehingga, secara sederhana pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Kedua faktor inilah yang mempengaruhi penduduk baik itu dari sisi jumlah maupun karakteristik penduduk.

Data lengkap mengenai penduduk beserta karakteristiknya biasanya dikumpulkan oleh BPS melalui kegiatan SP yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Disamping itu, data mengenai jumlah penduduk beserta beberapa karakteristiknya dapat diketahui berdasarkan hasil proyeksi, estimasi Supas (Survei Penduduk antar Sensus), Susenas, Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), dan hasil pendataan registrasi penduduk.

Tabel 2.1.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Bali Tahun 1961 – 2011

Rincian	Tahun					
	1961	1971	1980	1990	2000	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	-	-	1.224.869	1.384.948	1.581.460	2.004.126
Perempuan	-	-	1.244.855	1.392.408	1.565.539	1.970.564
L + P	1.782.529	2.120.091	2.469.724	2.777.356	3.146.999	3.974.689
LPP	-	1,75	1,54	1,18	1,26	2,15

Sumber: SP 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, Susenas 2011

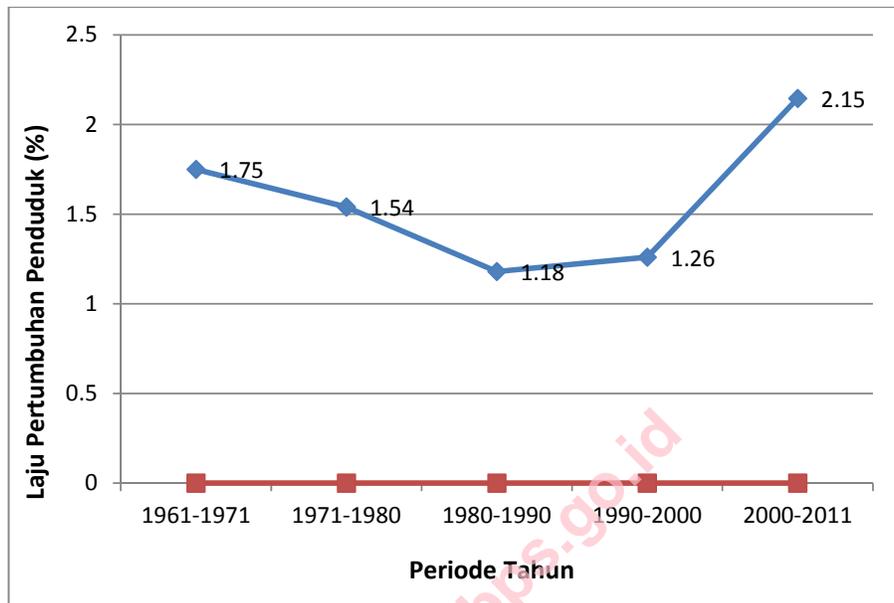
Jumlah penduduk Provinsi Bali dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada Tahun 1961 jumlah penduduk Provinsi Bali baru sejumlah 1,78 juta jiwa. Angka ini mengalami peningkatan hingga menjadi 2,12 juta jiwa pada Tahun 1971. Dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 1,75 persen, pada Tahun 1980 jumlah penduduk Provinsi Bali mengalami peningkatan menjadi 2,47 juta jiwa. Selanjutnya, dalam periode sepuluh tahun kemudian, jumlah penduduk Provinsi Bali meningkat menjadi 2,78 juta jiwa. Pada Tahun 2000, jumlah penduduk Provinsi Bali adalah sebesar 3,15 juta jiwa. Nilai ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai nilai 3,97 juta jiwa pada Tahun 2011.

Penduduk memiliki kecenderungan untuk mengalami peningkatan secara terus menerus, meskipun tingkat kelahiran telah menurun secara pesat. Todaro (2006) mengatakan, terdapat dua alasan pokok yang menyebabkan jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Pertama, tingkat kelahiran tidak mungkin dapat diturunkan hanya dalam waktu singkat. Kedua, struktur usia penduduk di negara berkembang yang mengalami pembengkakan di kelompok-kelompok usia tertentu.

Laju pertumbuhan penduduk tahunan Provinsi Bali terus mengalami penurunan dari periode 1961-1971 (1,75 persen per tahun) ke periode 1971-1980 (1,54 persen per tahun) hingga periode 1980-1990 (1,18 persen per tahun). Namun pada periode-periode berikutnya, laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami peningkatan. Pada periode 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan menjadi 1,26 persen per tahun, bahkan pada periode 2000-2011 menembus angka dua, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,15 persen per tahun. Kenaikan laju pertumbuhan penduduk ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya tingkat kelahiran yang diiringi dengan semakin menurunnya tingkat kematian. Program pengendalian pertumbuhan penduduk seperti KB yang pada tahun 1980an mencapai

kejayaannya mulai tidak terdengar gaungnya. Program KB saat ini mengalami pereduksian makna hanya sebatas program kontrasepsi.

Gambar 2.1.
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan, Provinsi Bali Tahun 1961 – 2011



Sumber: SP 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000, Susenas 2011

Pada periode Tahun 2000 hingga 2011, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki laju pertumbuhan penduduk positif. Kabupaten Badung dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 4,40 persen per tahun, dan Kota Denpasar dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 3,83 persen per tahun menjadikan kedua kabupaten/kota tersebut sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan tertinggi di Provinsi Bali. Tingginya migrasi masuk ke kedua kabupaten/kota ini menjadi faktor utama tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, serta peluang kerja menjadi daya tarik para pendatang untuk mencari pendapatan di Ibukota Provinsi Bali ini. Kabupaten Badung yang letak geografisnya bersebelahan dengan Kota Denpasar menjadi daerah tumpahan migran menuju Kota Denpasar.

Tabel 2.2.
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 1980 – 2011

Kabupaten/Kota	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan		
	1980-1990	1990-2000	2000-2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Jembrana	0,60	0,63	1,31
Tabanan	0,19	0,73	1,22
Badung	1,23	2,33	4,40
Gianyar	0,96	1,56	1,85
Klungkung	0,12	0,31	1,05
Bangli	0,88	0,94	1,17
Karangasem	0,89	0,49	1,06
Buleleng	1,04	0,33	1,21
Denpasar	4,05	3,20	3,83
Bali	1,18	1,26	2,15

Sumber: SP 1980, 1990, dan 2000, Susenas 2011

2.2. Sebaran Penduduk

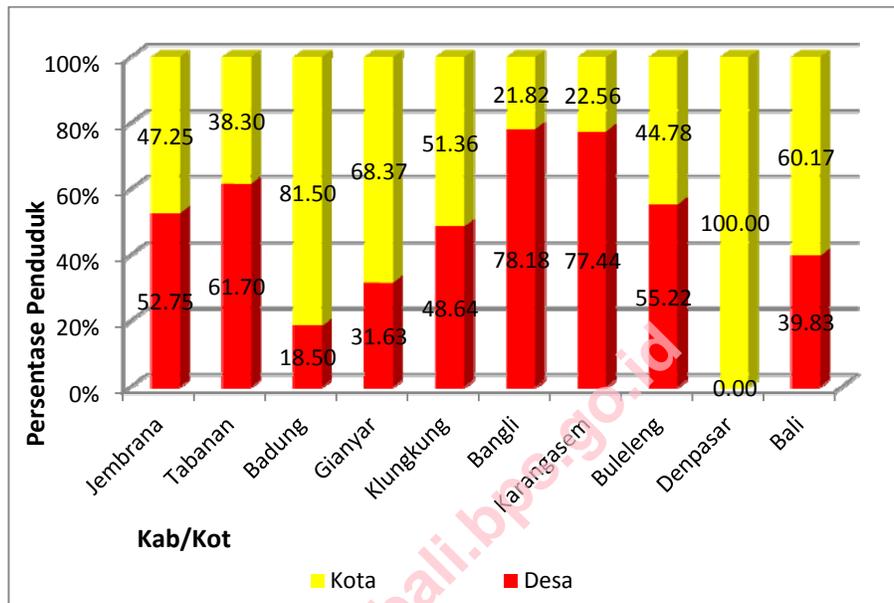
Besarnya proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan pada suatu wilayah dapat mengindikasikan terjadinya perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan di wilayah tersebut, atau disebut dengan urbanisasi. Beberapa sumber pertumbuhan penduduk perkotaan selain urbanisasi antara lain, penambahan penduduk alamiah, yaitu jumlah orang yang lahir dikurangi jumlah yang meninggal, serta reklasifikasi atau perubahan status dari perdesaan menjadi perkotaan.

Pada Tahun 2011, persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan di Provinsi Bali adalah sebesar 60,17 persen, sedangkan yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 39,83 persen. Dari proporsi persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan ini memberikan gambaran bahwa perkembangan penduduk Bali mengarah ke wilayah perkotaan. Banyaknya faktor pendorong dari daerah perdesaan dan faktor penarik dari daerah perkotaan menyebabkan terjadinya urbanisasi. Akibatnya, persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan semakin bertambah tinggi.

Gambar 2.2 memberikan gambaran persentase penduduk menurut kabupaten/kota dan daerah tempat tinggal di Provinsi Bali Pada Tahun 2011. Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem merupakan dua kabupaten di Provinsi Bali yang lebih dari 75 persen penduduknya tinggal di daerah perdesaan. Persentase penduduk Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem yang tinggal di daerah perdesaan masing-masing sebesar 78,18

persen dan 77,44 persen. Sementara wilayah yang persentase penduduknya yang tinggal di daerah perkotaan cukup tinggi selain Kota Denpasar adalah Kabupaten Badung dengan persentase sebesar 81,50 persen.

Gambar 2.2.
Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal,
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Distribusi penduduk menurut wilayah dapat memberikan gambaran mengenai komposisi jumlah penduduk antar wilayah di dalam Provinsi Bali. Pada Tahun 2011, hampir 20 persen penduduk Provinsi Bali bertempat tinggal di Kota Denpasar. Meskipun Kota Denpasar memiliki keterbatasan luas wilayah, namun hal ini tidak membatasi banyaknya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Kota Denpasar. Daya tarik Kota Denpasar melebihi daya dorong penduduk keluar Kota Denpasar, sehingga jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk melebihi yang melakukan migrasi keluar Kota Denpasar. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terkecil di Provinsi Bali, yaitu sebesar 4,38 persen. Luas wilayah Kabupaten Klungkung yang kecil dan dengan lokasinya yang cukup jauh dari Ibukota Provinsi Bali memberikan pengaruh terhadap kecilnya persentase jumlah penduduk di Kabupaten Klungkung.

Tabel 2.3.
Jumlah dan Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota,
Provinsi Bali Tahun 2009 - 2011

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			Distribusi Penduduk		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jembrana	258.895	262.101	267.497	7,28	6,71	6,73
Tabanan	415.877	421.079	429.624	11,69	10,78	10,81
Badung	425.269	547.728	555.695	11,96	14,03	13,98
Gianyar	442.023	471.713	480.733	12,43	12,08	12,09
Klungkung	168.243	170.797	174.206	4,73	4,37	4,38
Bangli	219.701	215.747	220.301	6,18	5,52	5,54
Karangasem	387.469	397.459	404.689	10,89	10,18	10,18
Buleleng	633.088	625.134	637.045	17,80	16,01	16,03
Denpasar	606.433	793.517	804.899	17,05	20,32	20,25
Jumlah	3.556.998	3.905.275	3.974.689	100	100	100

Sumber: Susenas 2009, 2010, dan 2011

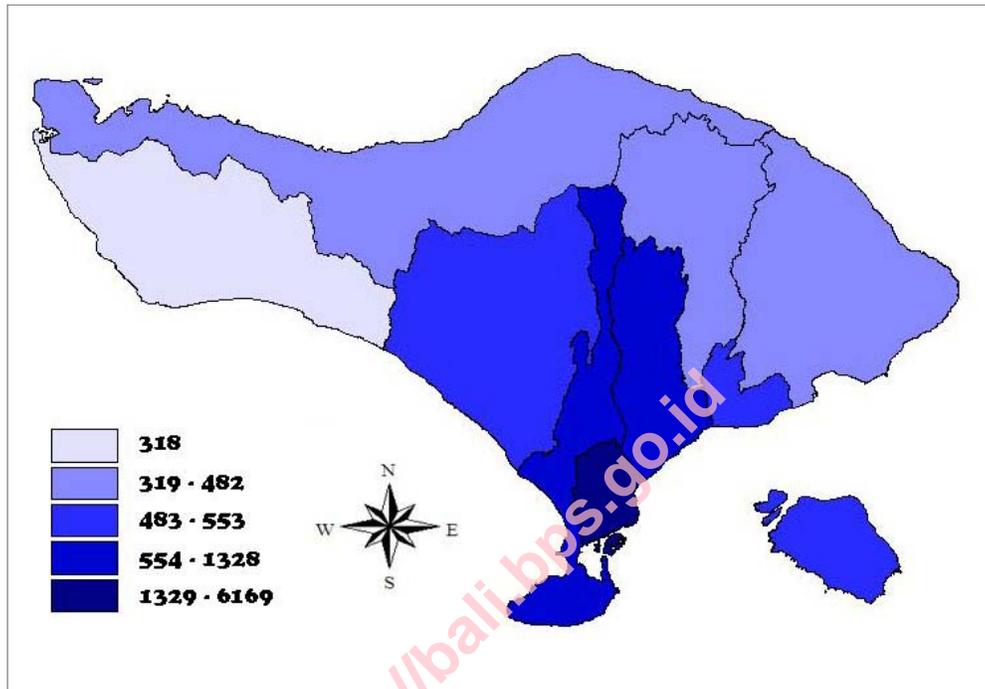
2.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat pemerataan penduduk di suatu wilayah. Menurut lembaga kesehatan internasional/ *World Health Association* (WHO) kepadatan penduduk normal adalah sebesar 9.600 jiwa per km^2 . Kepadatan yang sudah mencapai titik jenuh akan memberikan dampak negatif diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya pemenuh kebutuhan. Meningkatnya masalah sosial dan kriminalitas merupakan dampak yang mungkin akan terjadi diakibatkan oleh ketidakseimbangannya pemenuh kebutuhan seperti fasilitas sosial dan ekonomi. Pemerataan penduduk melalui relokasi penduduk dalam bentuk migrasi diharapkan dapat menyeimbangkan proporsi antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya di suatu wilayah.

Secara umum, kepadatan penduduk di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di daerah perdesaan. Ketersediaan fasilitas kehidupan di daerah perkotaan menjadi faktor penarik penduduk untuk melakukan perpindahan dari desa ke kota. Namun demikian, berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan perdesaan, maka perlu dilakukan

pemerataan pesebaran penduduk dari wilayah yang lebih padat penduduknya ke wilayah yang rendah tingkat kepadatannya.

Gambar 2.3.
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Gambar 2.3. menunjukkan kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2011. Dapat dilihat bahwa Kota Denpasar dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan luas wilayah yang kecil menjadikan Kota Denpasar daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu dengan kepadatan penduduk per km^2 sebesar 6.169 jiwa, jauh lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar adalah dua kabupaten yang memiliki tingkat kepadatan penduduk hampir sama, hal ini ditunjukkan dengan tingkat gradasi warna, dengan jumlah kepadatan penduduk per km^2 berada diantara 554 hingga 1.328 jiwa per km^2 . Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten dengan kepadatan penduduk per km^2 terendah, hal ini terlihat dari gradasi warna paling muda, yaitu sebesar 318 jiwa per km^2 .

2.4. Komposisi Penduduk

Selain jumlah penduduk, laju, dan pesebarannya, komposisi penduduk juga merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan karakteristik kependudukan. Dengan demikian, komposisi penduduk dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat suatu wilayah. Beberapa ukuran yang digunakan dalam komposisi penduduk adalah struktur umur, umur median, rasio dan angka ketergantungan, dan rasio jenis kelamin. Komposisi penduduk, selain digunakan sebagai bahan perencanaan juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan program pembangunan pemerintah, karena pada umumnya komposisi penduduk dapat mencerminkan tingkat kemajuan suatu wilayah.

2.4.1. Struktur Umur

Distribusi penduduk menurut kelompok umur selain memberikan gambaran mengenai pencerminan proses demografi pada masa lalu juga memberikan gambaran mengenai perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian. Distribusi penduduk menurut kelompok umur juga dapat merefleksikan beban ketergantungan kelompok usia tertentu terhadap kelompok usia lainnya.

Berdasarkan data hasil SP 2990, SP 2000, dan Susenas 2011, dapat diketahui bahwa telah terjadi pergeseran komposisi penduduk. Peningkatan komposisi terjadi pada kelompok umur tua, sehingga menarik komposisi secara keseluruhan untuk beranjak dari kategori penduduk menengah ke kategori penduduk tua. Pada tahun 1990 besarnya persentase kelompok penduduk 0-9 tahun adalah sebesar 18,41 persen. Persentase ini mengalami penurunan pada Tahun 2000 menjadi 17,68 persen, dan kembali mengalami penurunan di Tahun 2011 menjadi 17,51 persen. Sementara itu, kondisi yang berbeda terjadi pada kelompok umur tua, dimana besarnya persentase kelompok umur tua terus mengalami peningkatan seiring semakin menurunnya tingkat kematian. Secara rinci komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur,
Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011 (persentase)

Kelompok Umur	1990	2000	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	8,38	9,19	8,69
5-9	10,03	8,49	8,82
10-14	11,03	7,88	9,02
15-19	11,87	8,90	6,68
20-24	10,17	9,51	6,97
25-29	9,42	10,62	8,83
30-34	7,69	9,22	8,59
35-39	6,82	7,93	9,36
40-44	5,30	6,49	7,67
45-49	4,59	5,23	6,48
50-54	3,85	4,26	5,22
55-59	2,63	3,50	3,88
60-64	2,87	3,03	3,23
65-69	1,85	2,22	2,63
70-74	1,60	1,74	1,63
75+	1,90	1,78	2,28
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: SP 1990, 2000, dan Susenas 2011

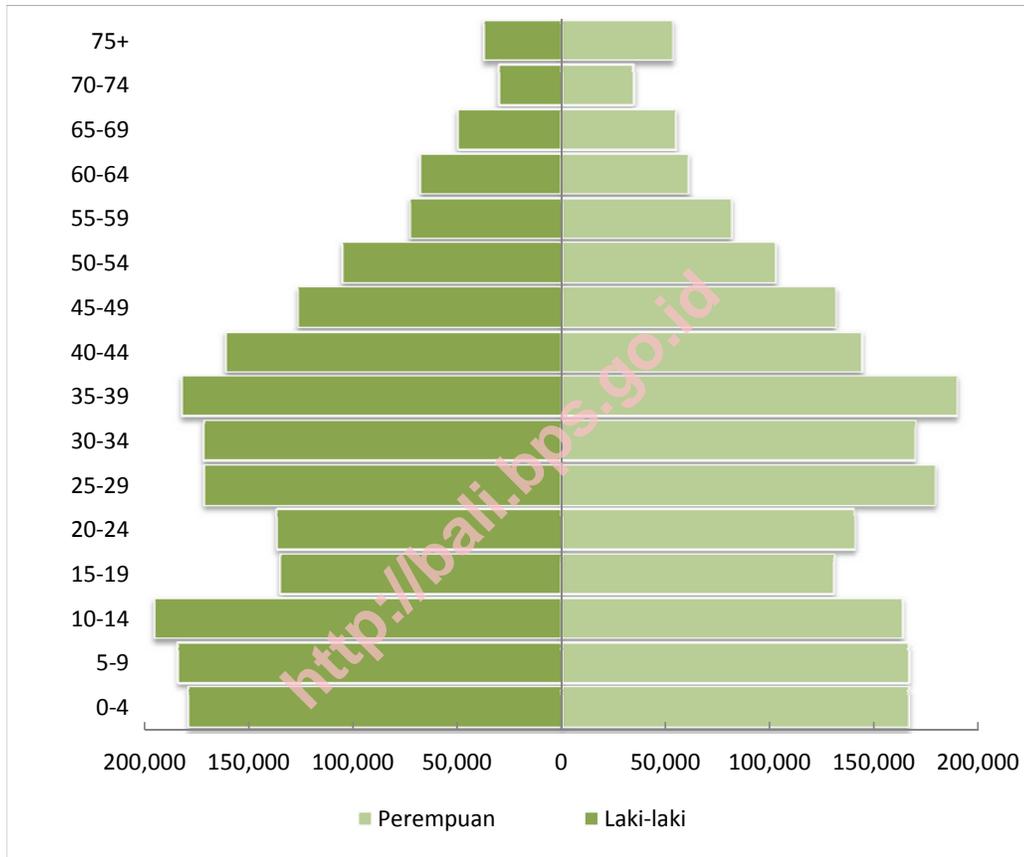
2.4.2. Piramida Penduduk

Piramida penduduk merupakan suatu bentuk refleksi dari struktur umur dan jenis kelamin. Bentuk suatu piramida penduduk sangat tergantung dari perumbuhan alamiah yang terdiri dari kelahiran dan kematian, serta migrasi neto yaitu migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Piramida penduduk dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu wilayah. Struktur umur penduduk wilayah berkembang pada umumnya menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia dewasa, hal ini diakibatkan oleh sedikitnya jumlah penduduk usia tua, serta tingkat kelahiran bayi yang tinggi, sehingga laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Hal ini berbeda dengan struktur umur penduduk wilayah maju, dimana pada umumnya jumlah penduduk usia muda dan usia tua hampir sama, hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang kecil.

Sebagaimana yang ditunjukkan piramida penduduk pada Gambar 2.4. terlihat bahwa bentuk piramida penduduk Provinsi Bali Tahun 2011 cenderung membentuk limas (*expansive*), sebagaimana bentuk piramida penduduk wilayah berkembang. Tingkat kelahiran di Provinsi Bali masih cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya

jumlah penduduk pada kelompok umur muda dibandingkan pada kelompok umur di atasnya. Jumlah penduduk tua di Provinsi Bali terus mengalami penurunan seiring bertambahnya umur. Berdasarkan gambaran tersebut, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali pada Tahun 2011 masih cukup tinggi.

Gambar 2.4.
Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin,
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

2.4.3. Umur Median

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, bagian yang pertama merupakan bagian yang lebih muda dari umur median, sedangkan bagian kedua merupakan bagian yang lebih tua. Umur median dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok tertentu.

Berdasarkan umur median, suatu wilayah dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun;
- b. Penduduk *intermediate*, jika umur median antara 20 tahun sampai 30 tahun;
- c. Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011, didapatkan umur median penduduk Provinsi Bali sebesar 30,57 tahun. Tingginya nilai umur median penduduk Provinsi Bali ini memberi arti bahwa penduduk di Provinsi Bali tergolong dalam kategori usia tua. Penduduk di Provinsi Bali sedang mengalami masa transisi dari kategori penduduk *intermediate* ke kategori penduduk tua

2.4.4. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia nonproduktif (penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk berumur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk berumur 15-64 tahun). Penduduk berumur dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif secara ekonomis karena dianggap masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya, sedangkan penduduk berumur 65 tahun keatas dianggap tidak produktif lagi secara ekonomi karena dianggap telah melewati masa pensiun.

Angka rasio ketergantungan ini dapat menggambarkan seberapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, maka semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan secara kasar dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut pengelompokan usia, yaitu rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua.

1. Rasio ketergantungan muda adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk berumur 0 hingga 14 tahun dengan banyaknya penduduk berumur 15 hingga 64 tahun.

2. Rasio ketergantungan tua adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk berumur 65 tahun keatas dengan banyaknya penduduk berumur 15 hingga 64 tahun.

Berdasarkan Tabel 2.5. dapat diketahui bahwa angka rasio ketergantungan Provinsi Bali Tahun 2011 adalah sebesar 49,43 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif di Provinsi Bali menanggung beban ekonomi sebesar 49 orang penduduk usia nonproduktif pada tahun 2011. Besarnya angka rasio ketergantungan Provinsi Bali ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan muda sebesar 39,65 dan rasio ketergantungan tua sebesar 9,78. Dari sini dapat diketahui bahwa penduduk usia produktif di Provinsi Bali pada Tahun 2011 lebih banyak dibebani tanggung jawab secara ekonomi oleh penduduk usia muda dibandingkan oleh penduduk usia tua.

Tabel 2.5.
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin
dan Rasio Ketergantungan, Provinsi Bali Tahun 2009 - 2011

Rincian	Persentase Jumlah Penduduk			Rasio Ketergantungan		
	0-14	15-64	65+	Muda	Tua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2009						
Laki-laki	27,70	65,72	6,57	42,15	10,00	52,15
Perempuan	24,07	68,01	7,92	35,40	11,64	47,04
Jumlah	25,89	66,87	7,25	38,72	10,84	49,55
2010						
Laki-laki	26,90	66,64	6,46	40,36	9,70	50,06
Perempuan	25,55	66,81	7,64	38,24	11,44	49,68
Jumlah	26,23	66,72	7,05	39,31	10,56	49,87
2011						
Laki-laki	27,85	66,31	5,84	42,00	8,81	50,81
Perempuan	25,20	67,54	7,26	37,31	10,75	48,06
Jumlah	26,54	66,92	6,54	39,65	9,78	49,43

Sumber: Susenas 2009, 2010, dan 2011

Berdasarkan Tabel 2.5. dapat diketahui bahwa besarnya rasio ketergantungan Provinsi Bali mengalami peningkatan dari 49,55 di Tahun 2009 menjadi 49,87 di Tahun 2010, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 49,43 di Tahun 2011. Jika dilihat berdasarkan perbandingan rasio ketergantungan muda dan tua, pada tiga tahun terakhir terjadi peningkatan rasio ketergantungan usia muda dan penurunan rasio ketergantungan usia tua. Besarnya rasio ketergantungan muda di Provinsi Bali mengalami peningkatan di Tahun 2010 sebesar 39,31 dari 38,72 pada Tahun 2009, dan terus mengalami peningkatan

menjadi 39,31 di Tahun 2011. Sedangkan besarnya rasio ketergantungan tua mengalami penurunan dari 10,84 di Tahun 2009 menjadi 10,56 di Tahun 2010 dan kembali mengalami penurunan menjadi 9,78 di Tahun 2011.

Terdapat perbedaan pola rasio ketergantungan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Pada rasio ketergantungan muda, penduduk laki-laki memiliki rasio ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sebaliknya, rasio ketergantungan tua lebih tinggi pada penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Besarnya angka rasio ketergantungan muda Provinsi Bali Tahun 2011 untuk laki-laki sebesar 42,00 sedangkan untuk perempuan sebesar 37,31. Besarnya angka rasio ketergantungan tua Provinsi Bali Tahun 2011 untuk laki-laki sebesar 8,81 sedangkan untuk perempuan sebesar 10,75.

Tabel 2.6.
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan,
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Persentase			Dependency Ratio		
		0-14	15-64	65+	Muda	Tua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jembrana	27,29	66,27	6,44	41,18	9,72	50,90
2.	Tabanan	22,62	69,01	8,37	32,78	12,13	44,90
3.	Badung	26,76	67,78	5,46	39,48	8,05	47,53
4.	Gianyar	24,92	67,40	7,69	36,97	11,41	48,38
5.	Klungkung	25,85	64,78	9,37	39,90	14,46	54,36
6.	Bangli	27,44	64,94	7,62	42,26	11,73	53,99
7.	Karangasem	29,82	62,78	7,40	47,49	11,79	59,28
8.	Buleleng	27,82	64,66	7,52	43,02	11,63	54,66
9.	Denpasar	26,42	70,01	3,57	37,74	5,10	42,83
	Bali	26,54	66,92	6,54	39,65	9,78	49,43

Sumber: Susenas 2011

Berdasarkan Tabel 2.6. dapat diketahui bahwa Kabupaten Karangasem adalah kabupaten dengan angka rasio ketergantungan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali yaitu sebesar 59,28. Besarnya angka rasio ketergantungan Kabupaten Karangasem ini memiliki arti bahwa beban tanggung jawab ekonomi penduduk usia produktif di Kabupaten Karangasem adalah yang tertinggi dibandingkan dengan beban tanggung jawab ekonomi penduduk usia produktif kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Pada Tahun 2011, Kota Denpasar merupakan kabupaten/kota yang memiliki rasio ketergantungan paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, dengan nilai rasio ketergantungan

sebesar 42,83. Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali merupakan daerah tujuan para migrant untuk memperoleh pendapatan, sehingga persentase penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Kabupaten-kabupaten yang memiliki angka rasio ketergantungan diatas 50 adalah Kabupaten Karangasem, Buleleng, Klungkung, Bangli, dan Kabupaten Jembrana, sedangkan empat kabupaten/kota lainnya memiliki angka rasio ketergantungan berada di bawah 50.

2.4.5. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) berguna untuk untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Angka rasio jenis kelamin dapat digunakan untuk mempelajari pola atau perubahan rasio jenis kelamin menurut golongan umur. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi besarnya rasio jenis kelamin, antara lain rasio jenis kelamin saat lahir, pola mortalitas penduduk laki-laki dan perempuan, dan pola migrasi penduduk laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan kelompok umur, rasio jenis kelamin secara umum memiliki pola tertentu. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur muda merupakan rasio jenis kelamin yang tertinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, angka rasio jenis kelamin ini mengalami penurunan pada kelompok umur produktif dan terus mengalami penurunan pada kelompok umur tua. Adanya perbedaan pola mortalitas antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, dimana penduduk laki-laki pada umumnya cenderung rentan dalam hal tingkat kesehatan dan memiliki angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perempuan, menjadi faktor utama yang menyebabkan perbedaan angka rasio jenis kelamin antar kelompok umur ini.

Nilai rasio jenis kelamin Provinsi Bali Tahun 2011 adalah sebesar 101,70 artinya dari setiap 100 penduduk perempuan di Provinsi Bali terdapat sebanyak 102 penduduk laki-laki. Besarnya angka rasio jenis kelamin Provinsi Bali terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 rasio jenis kelamin Provinsi Bali adalah sebesar 101,70 nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2009 sebesar 99,88 dan Tahun 2010 sebesar 101,68.

Tabel 2.7.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Provinsi Bali Tahun 2009 - 2011

Tahun	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	114,94	96,53	82,91	99,88
2010	107,04	101,42	86,00	101,68
2011	112,38	99,85	81,85	101,70

Sumber: Susenas 2009, 2010, dan 2011

Berdasarkan Tabel 2.7. dapat diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir rasio jenis kelamin penduduk kelompok umur muda Provinsi Bali merupakan rasio jenis kelamin tertinggi dibandingkan dengan rasio jenis kelamin kelompok umur lainnya, nilai ini mengalami penurunan pada kelompok umur produktif dan terus menurun pada kelompok umur tua. Pada Tahun 2011 besarnya rasio jenis kelamin di Provinsi Bali adalah sebesar 101,70 dimana angka rasio jenis kelamin usia muda adalah sebesar 112,38 lebih tinggi dibandingkan dengan rasio jenis kelamin kelompok umur produktif sebesar 99,85 dan kelompok umur tua sebesar 81,85.

Tabel 2.8.
Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/kota dan Rasio Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Persentase		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jembrana	50,20	49,80	100,80
2.	Tabanan	49,78	50,22	99,13
3.	Badung	50,03	49,97	100,11
4.	Gianyar	50,77	49,23	103,11
5.	Klungkung	50,10	49,90	100,39
6.	Bangli	52,24	47,76	109,40
7.	Karangasem	50,19	49,81	100,75
8.	Buleleng	49,58	50,42	98,35
9.	Denpasar	51,26	48,74	105,17
	Bali	50,42	49,58	101,70

Sumber: Susenas 2011

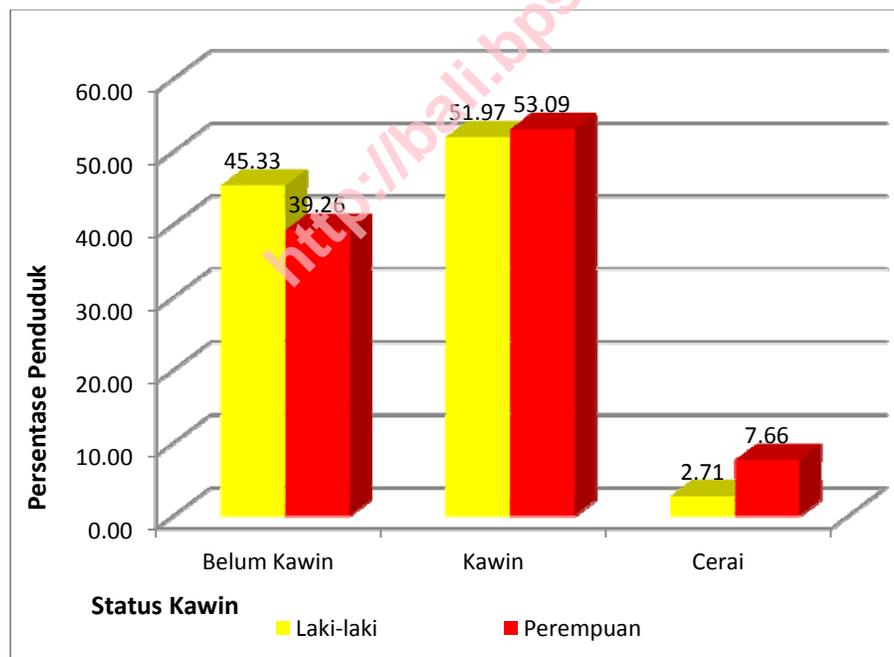
Tabel 2.8. menggambarkan rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota Provinsi Bali Tahun 2011. Dari Tabel 2.8. dapat diketahui bahwa pada Tahun 2011, Kabupaten Bangli merupakan kabupaten dengan angka rasio jenis kelamin tertinggi di Provinsi Bali yaitu sebesar 109,40 disusul Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar, masing-masing

sebesar 105,17 dan 103,11. Kabupaten/kota yang memiliki angka rasio jenis kelamin terkecil di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 98,35 disusul oleh Kabupaten Tabanan dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 99,13. Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Buleleng dan Tabanan yang berada di bawah 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di kedua kabupaten tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

2.4.6. Status Perkawinan

Status perkawinan penduduk di suatu wilayah secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi demografi di suatu wilayah. Semakin besar proporsi penduduk yang terikat dalam ikatan perkawinan, maka semakin tinggi peluang penduduk untuk memiliki anak sehingga meningkatkan tingkat fertilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Gambar 2.5.
Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin,
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

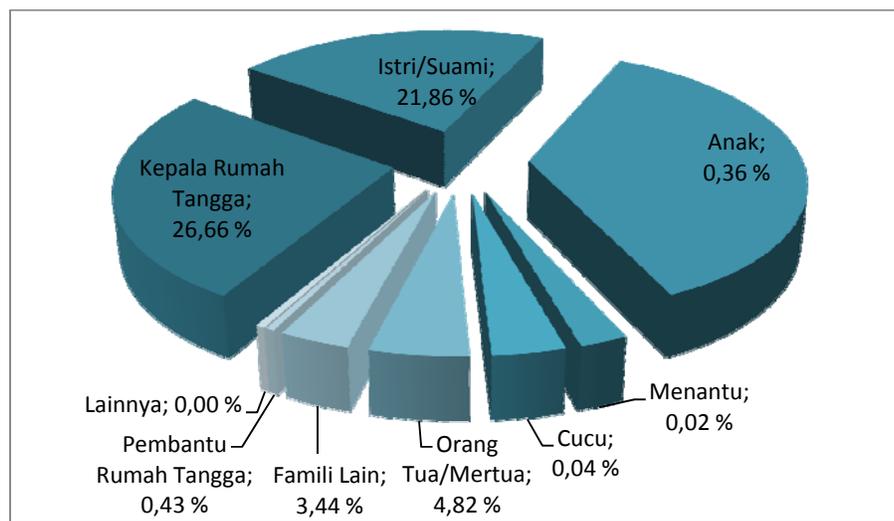
Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011, diketahui bahwa sebagian besar penduduk Provinsi Bali berstatus kawin, yaitu sebesar 52,52 persen. Persentase penduduk Provinsi Bali pada Tahun 2011 yang belum menikah adalah sebesar 42,32 persen, dan yang berstatus cerai sebesar 5,16 persen. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, secara

persentase penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan, yaitu sebesar 45,33 persen untuk laki-laki dan 39,26 persen untuk perempuan. Kondisi sebaliknya terjadi pada penduduk berstatus kawin, persentase penduduk berstatus kawin untuk laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan penduduk perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang berstatus kawin adalah sebesar 51,97 persen, sedangkan untuk perempuan sebesar 53,09 persen. Hal serupa terjadi pada penduduk berstatus cerai, persentase penduduk laki-laki yang berstatus cerai sebesar 2,71 persen kecil dibandingkan dengan penduduk perempuan berstatus cerai sebesar 7,66 persen.

2.4.7. Status dalam Rumah Tangga

Proporsi penduduk berdasarkan status dalam rumah tangga di suatu wilayah secara umum dapat memberikan gambaran struktur rumah tangga di wilayah tersebut. Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011, dapat diketahui bahwa sebesar 26,66 persen penduduk Provinsi Bali berstatus sebagai kepala rumah tangga, sedangkan penduduk yang berstatus sebagai suami/istri sebesar 21,86 persen dan sebagai anak sebesar 36,41 persen. Perbedaan antara persentase penduduk yang berstatus sebagai kepala rumah tangga dengan yang berstatus suami/istri selain mengindikasikan adanya kepala rumah tangga yang tidak tinggal bersama pasangannya, serta menggambarkan keberadaan rumah tangga tunggal.

Gambar 2.6.
Persentase Penduduk Menurut Status dalam Rumah Tangga,
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Gambar 2.6. menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 di Provinsi Bali masih terdapat keluarga yang menganut sistem *extended family*, dimana keluarga tidak hanya terdiri dari keluarga inti saja yaitu ayah, ibu dan anak-anak, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat ditunjukkan dari status penduduk yang keberadaannya dalam rumah tangga sebagai menantu (2,35 persen), cucu (3,59 persen), orang tua/mertua (4,82 persen) dan family lain (3,44 persen). Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai pembantu rumah tangga sebesar 0,43 persen dan lainnya sebesar 0,46 persen.

<http://bali.bps.go.id>

BAB III

FERTILITAS



Fertilitas atau kelahiran adalah istilah dalam demografi yang mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita, atau sekelompok wanita (proses reproduksi), atau dengan kata lain fertilitas adalah hasil reproduksi yang nyata dari potensi fisik seorang wanita untuk melahirkan anak. Fertilitas merupakan salah satu komponen alamiah yang menentukan laju pertumbuhan penduduk sehingga menjadi indikator utama dalam upaya pengendalian penduduk.

Perkembangan yang cukup pesat di bidang kedokteran dan obat-obatan berakibat pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Penurunan tingkat mortalitas terjadi seiring meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Di lain pihak penurunan tingkat mortalitas tidak secara serta merta diimbangi dengan penurunan tingkat fertilitas, hal ini tentunya akan berakibat pada tingginya laju pertumbuhan penduduk. Jika hal ini terus terjadi tentu akan berakibat pada berbagai masalah kependudukan, terutama pada masalah ekonomi, sosial, dan pertahanan/keamanan. Oleh karena itu, fertilitas merupakan salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk. Upaya pengendalian tingkat fertilitas pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga akan berdampak pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecenderungan fertilitas di suatu wilayah tidak terlepas beberapa faktor pendukung, seperti kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Beberapa penulis pernah memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas, salah satunya Kingsley Davis dan Judith Blake (1956). Davis dan Blake mengemukakan beberapa variabel yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkat fertilitas, yaitu:

- a. Variabel yang mempengaruhi terjadinya hubungan kelamin (*intercourse variable*), yaitu umur mulai hubungan kelamin, lamanya dalam ikatan perkawinan, abstinensi (tidak melakukan hubungan kelamin) baik sukarela maupun terpaksa karena sakit, hamil atau suami jauh, serta frekuensi senggama.
- b. Variabel yang mempengaruhi pembuahan (*conception variable*), meliputi kesuburan atau kemandulan oleh hal-hal yang tidak disengaja, pemakaian alat-alat

kontrasepsi, kesuburan atau kemandulan oleh faktor-faktor yang disengaja seperti sterilisasi.

- c. Variabel yang mempengaruhi terjadinya kehamilan dan kelahiran (*gestration variable*), yaitu mortalitas janin karena faktor-faktor yang disengaja, dan mortalitas janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja.

Penulis lain, yaitu Roland Freedman (1975) mengatakan bahwa modernisasi dapat mengubah perilaku masyarakat dan kepribadiannya yang akan mempengaruhi fertilitas secara tidak langsung melalui variabel antara. Menurut Freedman, tingkat fertilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penyuluhan kepada masyarakat bahwa mereka dapat mengendalikan fertilitas mereka sendiri, penyediaan alat kontrasepsi, peningkatan status wanita.

Publikasi Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali Tahun 2011 ini mencoba menyajikan indikator-indikator fertilitas dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dalam Susenas. Beberapa indikator yang terkait fertilitas yang dapat diperoleh dari Susenas antara lain rata-rata anak lahir hidup, rasio anak-ibu, umur perkawinan pertama, lama dalam ikatan perkawinan, keluarga berencana, dan pendidikan wanita pernah kawin.

3.1. Rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH)/*Child Ever Born* (CEB)

Rata-rata anak lahir hidup adalah jumlah kelahiran dari sekelompok perempuan pada saat mulai memasuki usia subur hingga saat pengumpulan data dilakukan. Semakin besar rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita usia subur menunjukkan semakin tingginya tingkat fertilitas.

Rata-rata jumlah anak lahir hidup menurut kelompok umur menggambarkan perjalanan fertilitas wanita dari memasuki usia subur hingga memasuki kelompok umur tertentu. Oleh karena itu, rata-rata jumlah anak lahir hidup menurut kelompok umur akan membentuk pola dimana secara rata-rata ibu dengan kelompok umur muda akan mempunyai anak yang lebih sedikit dibandingkan dengan ibu dengan kelompok umur tua. Pada Tabel 3.1. disajikan data rata-rata jumlah anak lahir hidup menurut kelompok umur wanita di Provinsi Bali Tahun 2009 hingga 2011. Dari Tabel 3.1. terlihat bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup meningkat seiring dengan usia wanita.

Pada Tahun 2011, rata-rata anak lahir hidup di Provinsi Bali mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan Tahun 2010, namun tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan indikator yang sama di Tahun 2009. Pada Tahun 2011, rata-rata anak lahir hidup di Provinsi Bali mencapai nilai 2,01, sedangkan rata-rata anak lahir hidup pada Tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 2,05 dan 1,57. Nilai rata-rata anak lahir hidup sebesar 2,01 ini

memiliki arti bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita usia subur (15 hingga 49 tahun) adalah sebanyak dua orang.

Tabel 3.1.
Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Kelompok Umur Wanita,
Provinsi Bali Tahun 2009 –2011

Kelompok Umur	Rata-rata Anak Lahir Hidup per Wanita Usia Subur		
	2009	2010	2011
(2)	(3)	(4)	(5)
15-19	0,04	0,43	0,67
20-24	0,49	0,96	0,92
25-29	1,18	1,50	1,42
30-34	1,84	1,97	1,97
35-39	2,12	2,31	2,30
40-44	2,43	2,49	2,50
45-49	2,62	2,71	2,63
15-49	1,57	2,05	2,01

Sumber: Susenas 2009, 2010, dan 2011

Peningkatan rata-rata anak lahir hidup akan berakibat pada peningkatan jumlah balita. Jumlah balita di Provinsi Bali pada Tahun 2011 selalu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, yaitu dari 289.787 di Tahun 2009 meningkat menjadi 341.225 di Tahun 2010, dan kembali meningkat di Tahun 2011 menjadi 345.540. Peningkatan jumlah balita ini tentunya berdampak pada peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan anak, serta peningkatan kebutuhan fasilitas pendidikan dasar untuk kedepannya.

Tabel 3.2.
Jumlah Balita Menurut Kabupaten/Kota,
Provinsi Bali Tahun 2009 –2011

No	Kab/Kota	Jumlah Balita		
		2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jembrana	21.668	21.237	23.243
2.	Tabanan	25.175	27.534	31.944
3.	Badung	37.557	55.552	49.203
4.	Gianyar	35.836	37.224	37.474
5.	Klungkung	13.286	13.634	15.866
6.	Bangli	17.857	19.772	20.024
7.	Karangasem	34.238	36.066	35.452
8.	Buleleng	52.714	52.396	59.274
9.	Denpasar	51.456	77.810	73.060
	Bali	289.787	341.225	345.540

Sumber: Susenas 2009, 2010, dan 2011

3.2. Rasio Anak-Ibu (*Child Woman Ratio/CWR*)

Rasio anak-ibu adalah perbandingan jumlah anak berumur 0 hingga 4 tahun per 1000 wanita usia subur, yaitu wanita yang berumur 15 hingga 49 tahun. Rasio anak-ibu ini memberikan gambaran tentang beban ibu dalam mengurus anak. Semakin besar rasio anak – ibu, maka semakin besar beban yang ditanggung seorang wanita berumur 15 hingga 49 tahun dalam mengurus anak.

Tabel 3.3.
Rasio Anak-Ibu Kabupaten/Kota,
Provinsi Bali Tahun 2009 –2011

No	Kab/Kota	Jumlah Balita		
		2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jembrana	315,8	316,2	317,7
2.	Tabanan	226,7	249,0	278,9
3.	Badung	310,9	343,8	311,9
4.	Gianyar	296,3	293,0	289,5
5.	Klungkung	312,5	305,9	361,4
6.	Bangli	317,2	373,7	356,0
7.	Karangasem	377,9	385,6	343,5
8.	Buleleng	334,9	334,2	354,6
9.	Denpasar	272,6	321,7	303,7
	Bali	302,8	323,1	318,2

Sumber: Susenas 2009, 2010 dan, 2011

Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011, dapat diketahui bahwa rasio anak-ibu di Provinsi Bali Tahun 2011 adalah sebesar 318,2. Angka ini berarti terdapat 318 balita usia 0 hingga 4 tahun per 1000 wanita usia 15 hingga 49 tahun. Nilai ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan rasio anak-ibu di Tahun 2010 yang mencapai 323,1. Namun nilai ini masih tetap mengalami kenaikan dibandingkan dengan besarnya rasio anak-ibu di Tahun 2009 dengan rasio sebesar 302,8.

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten dengan nilai rasio ibu-anak tertinggi di Provinsi Bali, dengan nilai sebesar 361,4. Terdapat empat kabupaten yang besarnya rasio anak-ibu melebihi nilai Provinsi Bali, keempat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kabupaten Karangasem. Sedangkan kabupaten dengan nilai rasio anak-ibu terendah di Provinsi Bali adalah Kabupaten Tabanan dengan nilai 289,5.

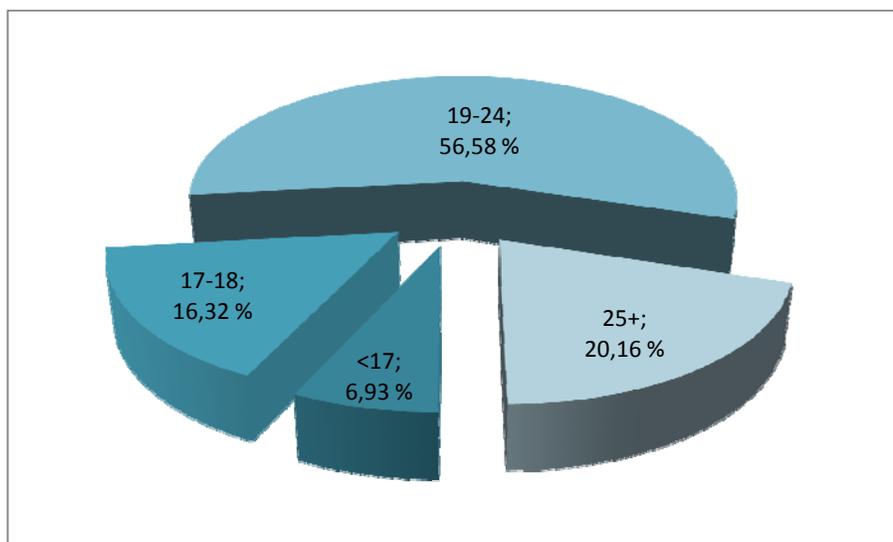
3.3. Umur Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama akan berpengaruh pada tingkat fertilitas yang pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk. Semakin muda umur perkawinan pertama maka akan memperpanjang masa reproduksi, sehingga akan menaikkan tingkat kelahiran. Sebaliknya, semakin tua umur perkawinan pertama maka akan mempersingkat masa reproduksi dan menurunkan tingkat kelahiran. Dengan demikian, penundaan umur perkawinan pertama merupakan salah satu upaya dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan cara menekan tingkat kelahiran.

Faktor ekonomi dan sosial budaya merupakan beberapa faktor penentu umur perkawinan pertama. Kesulitan ekonomi dan kebiasaan sosial budaya dapat menjadi alasan seseorang untuk memutuskan melakukan perkawinan umur muda. Namun demikian, perkawinan umur muda pada umumnya diwarnai oleh rasa keakuan sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

Baik umur perkawinan pertama yang terlalu muda maupun terlalu tua akan mengakibatkan resiko tinggi bagi kesehatan ibu dan anak. Kondisi fisik ketika mengandung dan melahirkan yang tidak ideal diakibatkan oleh faktor umur akan berakibat buruk bagi kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan. Umur perkawinan pertama yang dianjurkan menurut kesehatan yaitu antara 20 hingga 30 tahun.

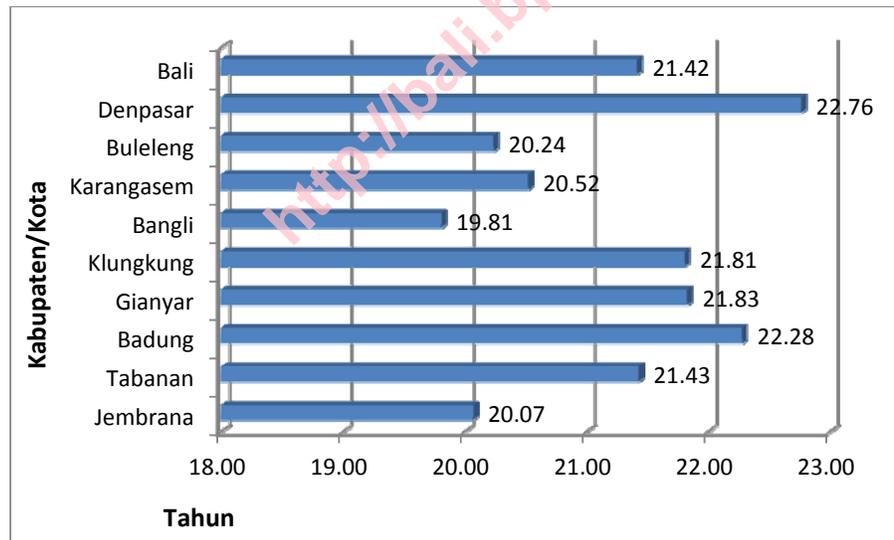
Gambar 3.1.
Persentase Wanita Usia Subur Menurut Umur Saat Perkawinan Pertama,
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Pada Tahun 2011, umur perkawinan pertama wanita usia subur (15 hingga 49 tahun) yang pernah kawin di Provinsi Bali sebagian besar berada pada kelompok umur 19 hingga 24 tahun. Persentase wanita usia subur yang pernah kawin yang memilih menunda perkawinan pertama mereka hingga umur antara 19 hingga 24 tahun adalah sebesar 56,68 persen. Bahkan 20,16 persennya memutuskan untuk menunda perkawinan pertamanya hingga umur di atas 25 tahun. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat mendorong para wanita untuk turut serta berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Disamping itu, dengan kemajuan jaman dan persaingan ekonomi memberikan kesempatan kepada wanita untuk turut berperan serta aktif dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Wanita mempunyai peluang yang sama untuk dapat berkarir setinggi mungkin seperti halnya laki-laki. Kenyataan ini berpengaruh pada keputusan kaum wanita dalam menjalani kehidupan perkawinan. Kebebasan berkarir dan kemandirian finansial cenderung mengakibatkan kaum wanita untuk menunda perkawinannya.

Gambar 3.2.
Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Wanita Usia Subur
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011



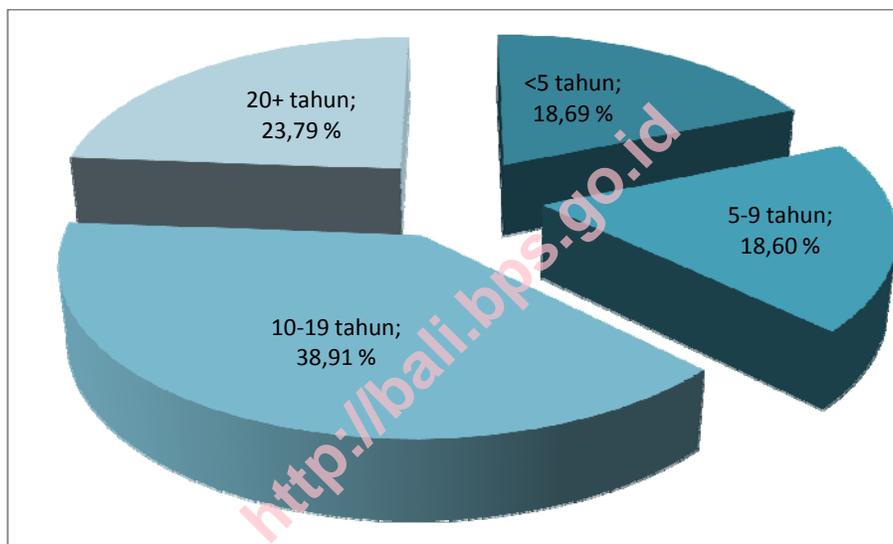
Sumber: Susenas 2011

Rata-rata umur perkawinan pertama wanita usia subur di Provinsi Bali pada Tahun 2011 adalah 21,42 tahun. Kabupaten Bangli merupakan kabupaten dengan rata-rata umur perkawinan pertama wanita usia subur terendah di Provinsi Bali, yaitu 19,81 tahun. Sedangkan kabupaten/kota yang rata-rata umur perkawinan pertamanya tertinggi adalah Kota Denpasar dengan rata-rata 22,76 tahun.

3.4. Lama dalam Ikatan Perkawinan

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, lamanya seseorang dalam ikatan perkawinan secara langsung akan mempengaruhi terjadinya hubungan kelamin, dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat fertilitas. Lama dalam ikatan perkawinan berbanding lurus dengan tingkat fertilitas. Semakin lama seseorang terikat dalam suatu ikatan perkawinan, maka akan semakin besar peluangnya untuk memproduksi sehingga akan menaikkan tingkat fertilitas.

Gambar 3.3.
Persentase Wanita Usia Subur Menurut Lama Tahun dalam Perkawinan,
Provinsi Bali Tahun 2011



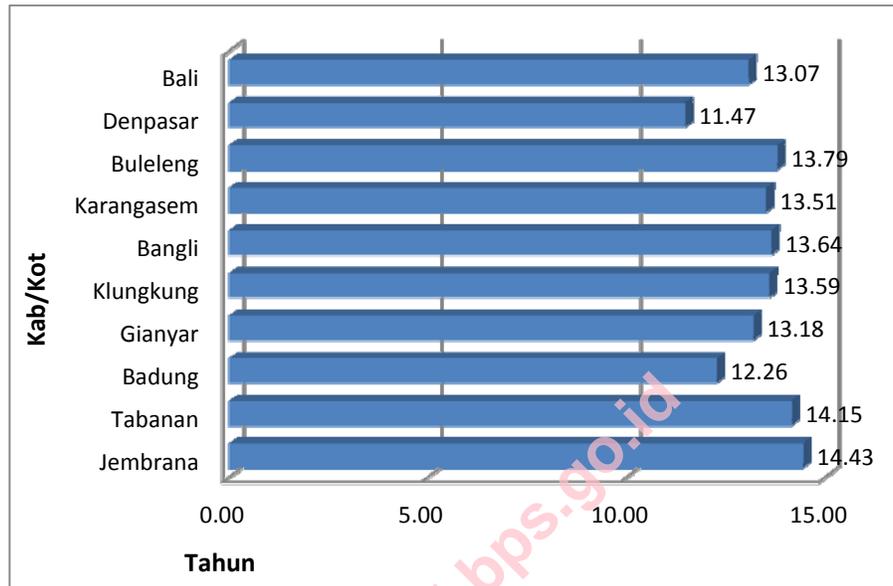
Sumber: Susenas 2011

Seperti halnya Tahun 2010, banyaknya wanita usia subur di Provinsi Bali menurut lama tahun dalam ikatan perkawinan pada Tahun 2011 sebagian masih berada pada kisaran 10 hingga 19 tahun. Tercatat sebanyak 38,91 persen wanita usia subur terikat dalam ikatan perkawinan selama 10 hingga 19 tahun, bahkan 23,79 persen wanita usia subur sudah menjalani ikatan perkawinan selama lebih dari 20 tahun. Hanya 18,69 persen wanita usia subur yang telah menjalani ikatan perkawinannya selama 5 hingga 9 tahun.

Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011 yang tersaji pada Gambar 3.4. dapat diketahui bahwa rata-rata wanita usia subur di Provinsi Bali telah menjalani 13,07 tahun dalam ikatan perkawinan. Dari semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, hanya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang rata-rata lama dalam ikatan perkawinannya lebih

rendah dibandingkan rata-rata provinsi, yaitu masing-masing sebesar 11,47 tahun dan 12,26 tahun.

Gambar 3.4.
Rata-rata Lama Wanita Usia Subur dalam Ikatan Perkawinan,
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

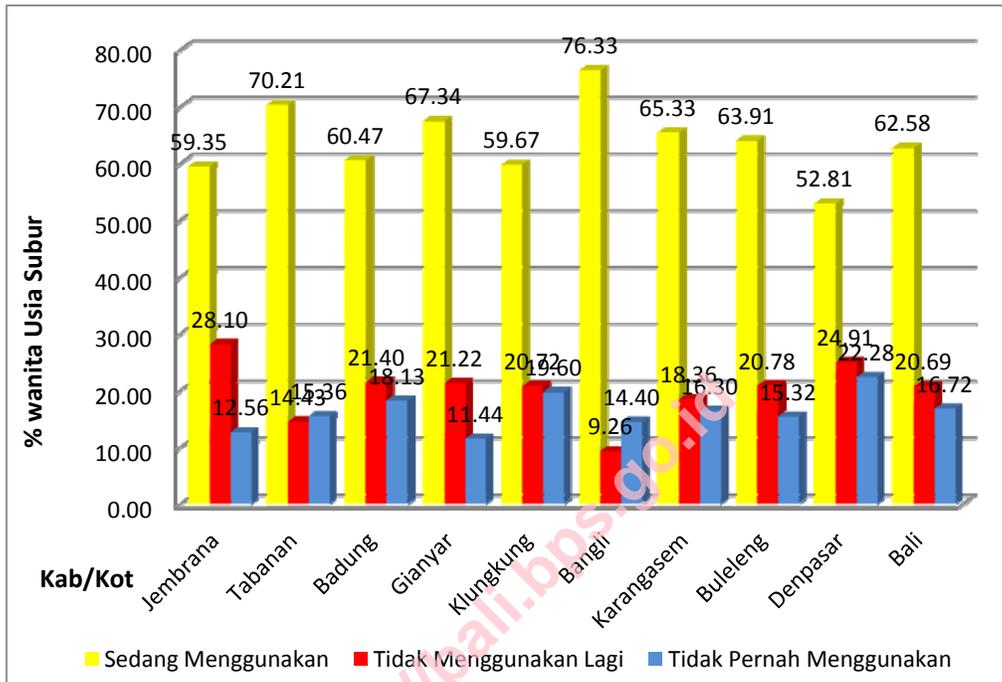
3.5. Keluarga Berencana (KB)

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Fertilitas merupakan salah satu komponen alamiah yang menentukan laju pertumbuhan penduduk sehingga menjadi salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan dalam rangka upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Melalui pengendalian tingkat fertilitas diharapkan laju pertumbuhan penduduk alamiah dapat ditekan. Di lain pihak, tingkat fertilitas yang terlalu rendah juga akan berakibat buruk pada tingkat kesejahteraan penduduk. Tingkat fertilitas yang terlalu rendah jika dibiarkan terus menerus maka akan mengakibatkan terjadinya kekurangan jumlah penduduk, dimana penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan.

Salah satu bentuk upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian tingkat fertilitas adalah melalui program keluarga berencana (KB). Keberhasilan program ini ditandai dengan menurunnya tingkat fertilitas melalui peningkatan akseptor KB aktif. Sasaran

utama dari program ini adalah pasangan usia subur, terutama pada wanita usia 15 hingga 49 tahun yang berstatus kawin.

Gambar 3.5.
 Persentase Wanita Usia Subur Pernah Kawin Menurut Keikutsertaan KB
 dan Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011



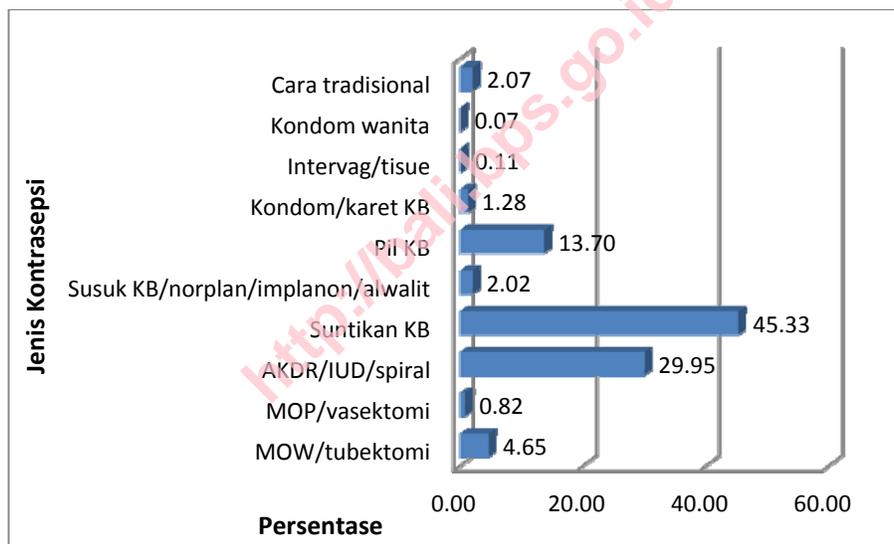
Sumber: Susenas 2011

Pada Tahun 2011, tercatat sebagian besar wanita usia subur pernah kawin di Provinsi Bali yang sedang menggunakan KB, yaitu dengan persentase sebesar 62,58 persen. Persentase wanita usia subur pernah kawin yang tidak menggunakan KB lagi adalah sebesar 20,69 persen, sedangkan 16,72 persen sisanya adalah wanita usia subur pernah kawin yang tidak pernah menggunakan KB. Wanita usia subur pernah kawin yang tidak pernah menggunakan KB inilah yang menjadi sasaran utama sosialisasi program KB. Kota Denpasar adalah daerah dengan persentase keikutsertaan KB terendah di Provinsi Bali dengan persentase sebesar 52,81 persen. Kabupaten Bangli dengan persentase keikutsertaan KB sebesar 76,33 persen menjadi daerah dengan persentase keikutsertaan KB tertinggi di Provinsi Bali.

Keputusan keikutsertaan pasangan usia subur pada program KB merupakan tanggung jawab bersama pria dan wanita. Namun demikian, berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011 menunjukkan masih rendahnya keikutsertaan pria dalam program KB. Hal ini terlihat

dari kecilnya persentase penggunaan alat KB berupa vasektomi (0,82 persen) dan kondom (1,28 persen). Sebagian besar wanita lebih memilih jenis KB berupa suntikan sebagai alat kontrasepsi, yaitu dengan persentase sebesar 45,33 persen. Penggunaan IUD/Spiral pada wanita juga menjadi salah satu pilihan favorit pasangan usia subur, hal ini terlihat dari besarnya persentase wanita yang memilih jenis KB tersebut sebesar 29,95 persen. Tercatat sebanyak 13,70 persen wanita memilih menggunakan jenis KB pil dan 4,65 persen wanita bersedia untuk melakukan sterilisasi melalui tindakan operasi/tubektomi. Disamping itu, terdapat sebanyak 2,07 persen wanita yang memilih menggunakan metode tradisional seperti pantang berkala, senggama terputus, atau cara-cara tradisional lainnya sebagai alat kontrasepsinya.

Gambar 3.6.
Partisipasi KB Wanita Pernah Kawin Kelompok Umur Subur
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

3.6. Pendidikan Wanita Pernah Kawin

Tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat fertilitas penduduk di daerah tersebut. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan mempertimbangkan perbandingan besarnya keuntungan yang akan di dapat dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan membesarkannya. Pandangan lama mengenai banyak anak banyak rejeki mulai memudar seiring dengan semakin meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan anak, serta batasan usia minimum pekerja.

Disamping itu, tingkat pendidikan juga berpengaruh pada tingkat fertilitas, khususnya dalam tingkat kesuburan. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan berakibat pada semakin rendahnya tingkat kesuburan yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat fertilitas. Pemahaman mengenai peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan mengendalikan jumlah anggota rumah tangga menjadi penyebab rendahnya tingkat fertilitas wanita pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan tergerak untuk mementingkan kualitas daripada kuantitas anak. Para wanita diberikan kesempatan yang lebih untuk bekerja demi mendukung perekonomian rumah tangga dalam rangka menunjang kehidupan anak. Dengan demikian, salah satu cara untuk menurunkan tingkat fertilitas penduduk adalah dengan memperbesar kesempatan di bidang pendidikan.

Gambar 3.7.
Rata-rata Anak Lahir Hidup Menurut Tingkat Pendidikan
Wanita Usia Subur Pernah Kawin, Provinsi Bali Tahun 2011



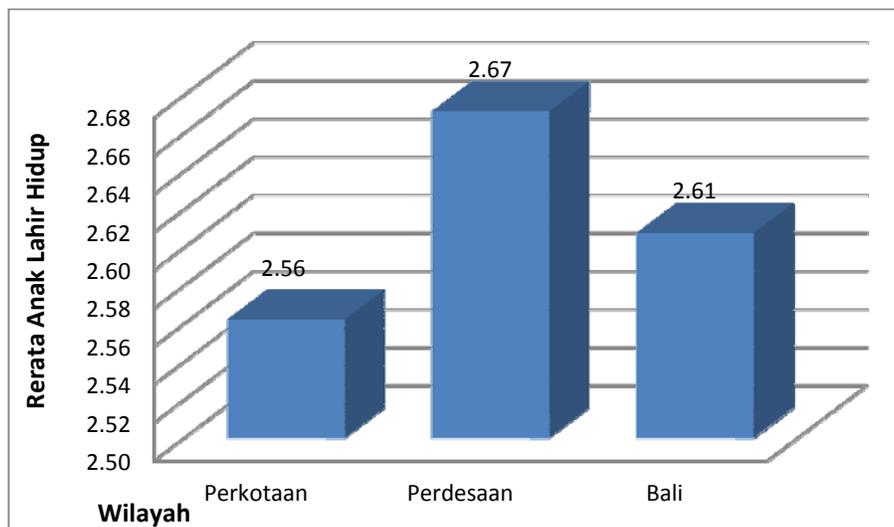
Sumber: Susenas 2011

Berdasarkan Gambar 3.7. dapat diketahui pola keterkaitan antara tingkat fertilitas, yang digambarkan dengan rata-rata anak lahir hidup, dengan tingkat pendidikan. Wanita dengan tingkat pendidikan rendah (tidak memiliki ijazah dan yang hanya memiliki ijazah SD) mempunyai rata-rata anak lahir hidup yang cukup tinggi. Rata-rata jumlah anak lahir hidup ini mengalami penurunan seiring meningkatnya kualitas pendidikan yang diterima seorang wanita. Penurunan rata-rata anak lahir hidup mencapai titik minimum ketika wanita berhasil menempuh pendidikan hingga jenjang D3. Namun demikian rata-rata jumlah anak lahir hidup

mengalami peningkatan pada wanita dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pada jenjang D4/S1 dan S2/S3. Wanita yang menempuh pendidikan yang tinggi cenderung mapan secara finansial, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam merawat anak. Lebih lanjut, wanita dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki usia perkawinan pertama lebih tinggi dibandingkan rata-rata usia kawin pertama, sehingga dengan wawasan dan pengetahuan yang luas, serta kesadaran akan resiko kesehatan reproduksi wanita yang sudah berumur, maka mereka akan berpacu dengan umur untuk mendapatkan jumlah anak yang sesuai dengan harapannya.

Keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan fertilitas juga dapat digambarkan dengan membandingkan tingkat fertilitas di wilayah perkotaan dan perdesaan. Penduduk di daerah perkotaan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta memiliki kemudahan dalam mengakses teknologi dan informasi dibandingkan dengan penduduk di daerah perdesaan. Berdasarkan hal ini Singh dan Lasterline (1985) berpendapat bahwa tingkat fertilitas di daerah perkotaan cenderung lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan. Sejalan dengan teori ini, data hasil Susenas Tahun 2011 menunjukkan bahwa rata-rata anak lahir hidup yang dilahirkan wanita usia subur pernah kawin di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan. Rata-rata jumlah anak lahir hidup yang dilahirkan wanita usia subur pernah kawin di daerah perkotaan adalah sebesar 2,56 lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan yang mencapai 2,67.

Gambar 3.8.
Rata-rata Anak Lahir Hidup Wanita Usia Subur Pernah Kawin Menurut Wilayah dan Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

BAB IV

MORTALITAS



WHO mendefinisikan mortalitas atau kematian sebagai suatu peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Mortalitas merupakan salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Tingkat mortalitas yang tinggi akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan penduduk alamiah. Kajian mengenai mortalitas bermanfaat untuk melihat status kesehatan, mengidentifikasi tingkat dan pola kematian di suatu daerah, melihat efektivitas program kesehatan, memonitor kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan serta studi-studi kependudukan lainnya.

Keterbatasan data kematian mengakibatkan keterbatasan penyajian indikator-indikator terkait mortalitas. Publikasi ini mencoba menyajikan indikator-indikator mortalitas dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dalam Susenas.

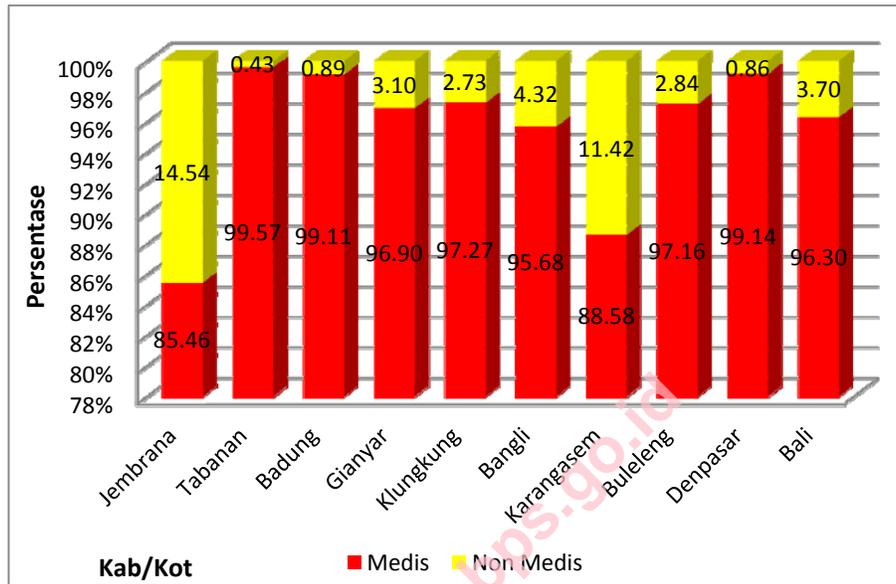
Tingkat kematian yang tinggi umumnya terjadi pada kelompok usia balita dan usia lanjut, sehingga pada umumnya kelompok usia ini dijadikan sebagai indikator tingkat mortalitas. Tingkat mortalitas kelompok usia balita dapat dijelaskan dengan berbagai indikator terkait tingkat kesehatan dan peluang kematian yang dialami oleh penduduk kelompok usia balita. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan tingkat mortalitas tersebut antara lain penolong pertama kelahiran, imunisasi anak balita, pemberian ASI, dan kesehatan wanita usia subur.

4.1. Penolong Pertama Kelahiran

Tingkat kesehatan kelompok usia balita tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesehatan ibu semasa kehamilan, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti proses kelahiran serta kondisi lingkungan tempat tinggal. Preferensi penduduk dalam memilih penolong kesehatan dapat menunjukkan tingkat kesadaran akan pentingnya kesehatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, maka akan semakin meningkatkan preferensi masyarakat dalam memilih tenaga medis sebagai penolong proses kelahiran. Proses persalinan yang ditolong oleh tenaga medis terdidik dan terlatih, seperti dokter atau bidan,

akan memperkecil peluang kematian ibu dan anak, sehingga secara tidak langsung akan menekan tingkat mortalitas.

Gambar 4.1.
 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran dan Kabupaten/Kota
 Provinsi Bali Tahun 2011



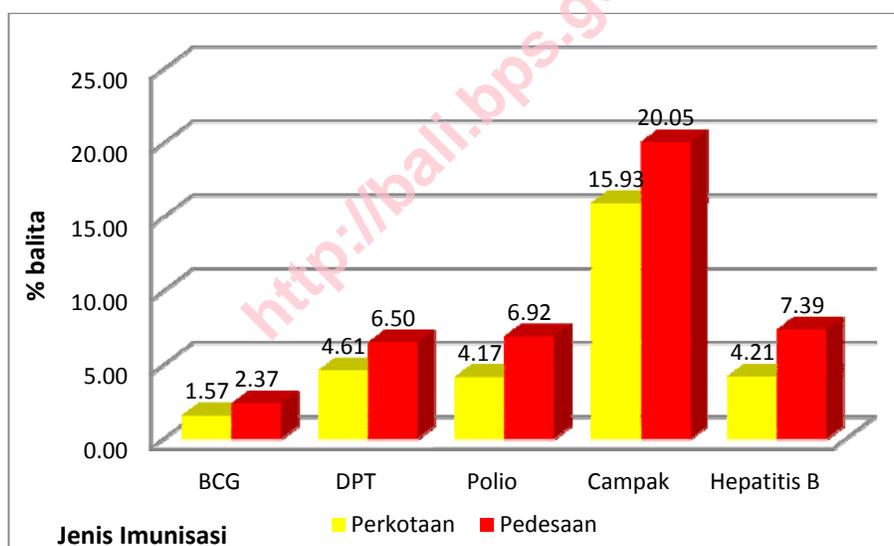
Sumber: Susenas 2011

Di Provinsi Bali sebagian besar proses kelahiran ditolong oleh tenaga medis, yaitu dokter, bidan atau tenaga medis lainnya. Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011, tercatat sebanyak 96,30 persen balita dilahirkan melalui proses kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis, sedangkan 3,70 persen sisanya ditolong oleh tenaga non medis seperti dukun bersalin, famili/keluarga atau lainnya. Pada Tahun 2011, persentase balita menurut penolong kelahiran tertinggi di Provinsi Bali adalah bidan, yaitu dengan persentase sebesar 55,06 persen, disusul oleh dokter sebesar 41,12 persen. Kabupaten Jembrana (14,54 persen) dan Kabupaten Karangasem (11,42 persen) merupakan dua kabupaten yang persentase penolong kelahiran non medisnya masih cukup tinggi. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan persalinan di kedua kabupaten ini diharapkan menjadi perhatian utama pemerintah. Melalui peningkatan pelayanan persalinan diharapkan dapat memurunkan tingkat kematian ibu dan anak, sehingga target pelaksanaan MDG's dapat tercapai.

4.2. Imunisasi Balita

Salah satu upaya untuk menekan tingkat kematian bayi adalah dengan pemberian imunisasi. Imunisasi adalah upaya untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin yang berisi bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Melalui pemberian vaksin ini diharapkan tubuh mampu membentuk antibodi alami untuk dapat melawan penyakit. Pemberian imunisasi kepada balita merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa imunisasi yang diwajibkan diberikan kepada balita antara lain BCG minimal satu kali, DPT minimal 3 kali, Polio minimal 4 kali, Hepatittis minimal 3 kali dan Campak minimal satu kali. Semakin lengkap pemberian imunisasi kepada balita diharapkan dapat menurunkan peluang balita untuk terserang penyakit.

Gambar 4.2.
Persentase Balita yang Belum Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi
Dan Wilayah, Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Pada Tahun 2011, sebanyak 81,95 persen balita di Provinsi Bali telah mendapatkan imunisasi dasar yang terdiri dari BCG, DPT, Polio, Hepatittis dan Campak. Dari semua jenis imunisasi dasar, jenis imunisasi campak merupakan jenis imunisasi dengan persentase pemberiannya terendah, yaitu hanya sebanyak 82,45 persen. Hal ini mungkin berkaitan dengan sosialisasi imunisasi campak yang masih belum segenar imunisasi lainnya.

Berdasarkan Gambar 4.2. dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara desa dan kota pada tingkat balita dalam memperoleh imunisasi. Terlihat bahwa pada semua jenis imunisasi, persentase balita yang belum pernah mendapatkan imunisasi di daerah perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan balita di daerah perkotaan. Keterbatasan informasi dan akses ke fasilitas kesehatan merupakan faktor utama penyebab terjadinya perbedaan persentase balita dalam memperoleh imunisasi, yang akhirnya akan berakibat pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi bagi kesehatan.

4.3. Pemberian Air Susu Ibu

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi alami dan makanan yang paling penting bagi kesehatan dan proses pertumbuhan bayi. Selain mengandung nilai gizi yang tinggi ASI juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Semakin lama periode pemberian ASI cenderung akan membuat daya tahan tubuh anak semakin baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa belum ada susu formula yang mampu menyamai kandungan nutrisi yang dimiliki ASI. Disamping itu ASI juga terjaga kesterilannya sehingga tidak mungkin terkontaminasi bakteri seperti yang terjadi pada susu formula. Pemberian ASI secara eksklusif pada anak selain mampu mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai macam penyakit, juga mampu menumbuhkan ikatan batin antara ibu dan anak.

Berdasarkan Tabel 4.1. mengenai persentase balita usia 2 hingga 4 tahun yang menyusui serta rata-rata lamanya menyusui dapat diketahui bahwa di Provinsi Bali pada Tahun 2011 terdapat sebanyak 92,91 persen balita usia 2 hingga 4 tahun yang pernah menyusui, sedangkan 7,09 persen sisanya tidak pernah mendapatkan ASI. Jika dilihat dari penyebarannya, persentase balita menyusui di daerah perdesaan lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan. Demikian pula rata-rata lama balita menyusui, balita di daerah perdesaan secara rata-rata menyusui selama 21 bulan lebih besar dibandingkan balita di daerah perkotaan yang hanya selama 18 bulan. Perbedaan pola ini dimungkinkan karena terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi antara masyarakat daerah perkotaan dan perdesaan. Gaya hidup dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah perkotaan yang lebih tinggi mendorong para perempuan di daerah perkotaan untuk turut serta berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini tentu berakibat terhadap ketersediaan waktu untuk menyusui dan pada akhirnya berakibat pada keputusan dalam pemberian ASI kepada bayi. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang sebagian besar wilayahnya tergolong sebagai perkotaan memiliki rata-rata lama pemberian ASI kepada balita usia 2 hingga 4 tahun

masing-masing selama 16,31 bulan dan 16,75 bulan, jauh lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali yang mencapai 19,19 bulan.

Tabel 4.1.
Persentase Balita Usia 2 - 4 Tahun yang Menyusui Serta Rata-rata Lamanya Menyusui Menurut Wilayah dan Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2009 –2011

No	Kab/Kota	Kota		Desa		Kota+Desa	
		% Balita Menyusui	Rata-rata Lama Menyusui (bulan)	% Balita Menyusui	Rata-rata Lama Menyusui (bulan)	% Balita Menyusui	Rata-rata Lama Menyusui (bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)
1.	Jembrana	95,67	22,63	92,74	21,36	94,12	21,97
2.	Tabanan	94,48	22,52	93,61	24,23	93,91	23,64
3.	Badung	82,58	15,51	84,77	21,21	82,88	16,31
4.	Gianyar	92,47	18,87	96,58	19,27	93,80	19,00
5.	Klungkung	96,97	19,00	94,83	19,38	95,86	19,20
6.	Bangli	90,24	21,18	93,25	20,49	92,72	20,61
7.	Karangasem	95,42	18,18	94,93	18,58	95,02	18,50
8.	Buleleng	96,36	19,91	96,79	21,58	96,59	20,81
9.	Denpasar	93,40	16,75	-	-	93,40	16,75
	Bali	91,94	18,06	94,42	20,93	92,91	19,19

Sumber: Susenas 2011

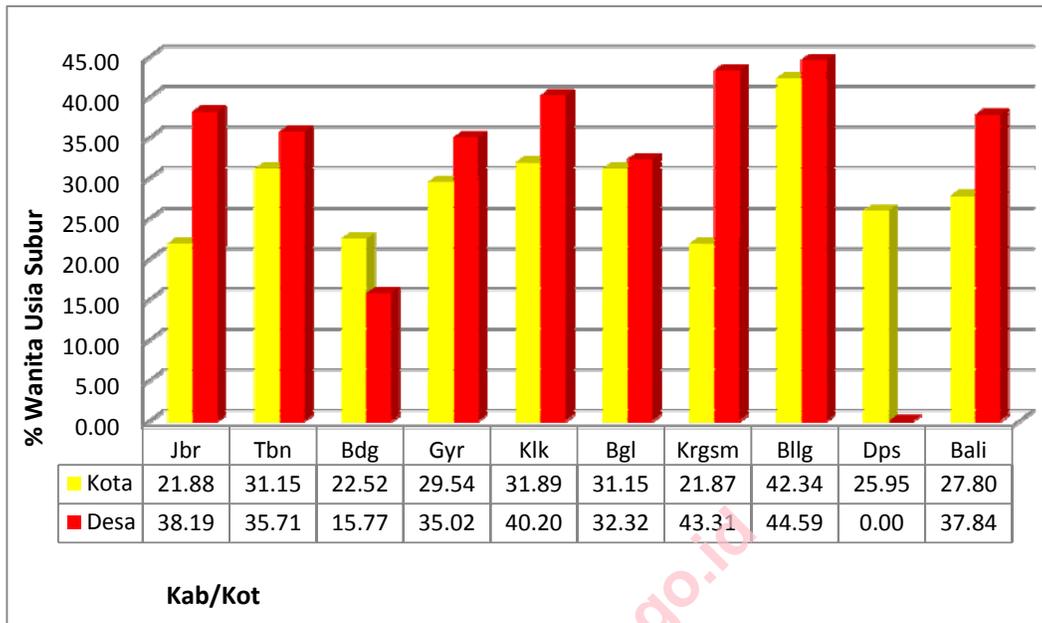
4.4. Kesehatan Wanita Usia Subur

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (*morbidity rate*). Angka kesakitan adalah banyaknya penduduk yang mengeluh sakit pada selang waktu tertentu. Status kesehatan penduduk dapat mempengaruhi pola aktivitas yang dilakukan. Penduduk yang sehat dapat melakukan aktivitas dengan normal sehingga produktivitas tetap terjaga.

Tingkat kesehatan wanita usia subur secara tidak langsung menggambarkan tingkat kesehatan ibu. Semakin kecil persentase perempuan yang memiliki keluhan kesehatan serta didukung dengan kondisi masyarakat yang semakin sadar akan arti penting kesehatan akan mendorong meningkatnya derajat kesehatan, sehingga berakibat pada menurunnya angka kematian.

Secara umum tingkat kesehatan wanita usia subur di Provinsi Bali pada Tahun 2011 cukup baik. Hal ini digambarkan dengan rendahnya persentase wanita yang memiliki keluhan kesehatan. Persentase wanita usia subur yang memiliki keluhan kesehatan adalah sebesar 31,74 persen, sedangkan 68,26 persen wanita usia subur lainnya tidak memiliki keluhan kesehatan.

Gambar 4.3.
 Persentase Wanita Usia Subur yang Memiliki Keluhan Kesehatan Dalam Sebulan
 Yang Lalu Menurut Wilayah dan Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Gambar 4.3. menunjukkan besarnya persentase wanita usia subur yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan yang lalu menurut wilayah dan kabupaten/kota. Hampir di seluruh wilayah di Provinsi Bali tingkat kesehatan wanita usia subur di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini terlihat dari persentase wanita yang memiliki keluhan kesehatan, dimana persentase di daerah perdesaan hampir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Tingginya persentase wanita usia subur yang memiliki keluhan kesehatan di daerah perdesaan kemungkinan diakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat perdesaan akan arti pentingnya kesehatan. Sebesar 21,17 persen dari wanita usia subur yang memiliki keluhan kesehatan di Provinsi Bali berasal dari Kabupaten Buleleng. Tingginya persentase ini hendaknya menjadi perhatian pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

BAB V

SOSIAL EKONOMI

RUMAH TANGGA



Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dengan satu pengelolaan makan. Melalui profil sosial ekonomi rumah tangga dapat diperoleh gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Beberapa indikator terkait sosial ekonomi rumah tangga yang dapat diperoleh dari Susenas antara lain mengenai profil rumah tangga, profil kepala rumah tangga, dan karakteristik perumahan.

5.1. Profil Rumah Tangga

Dalam Susenas, rumah tangga didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Satu dapur yang dimaksud disini adalah bahwa pembiayaan keperluan jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama. Jumlah rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga di Provinsi Bali dapat memberikan gambaran mengenai profil rumah tangga di wilayah tersebut.

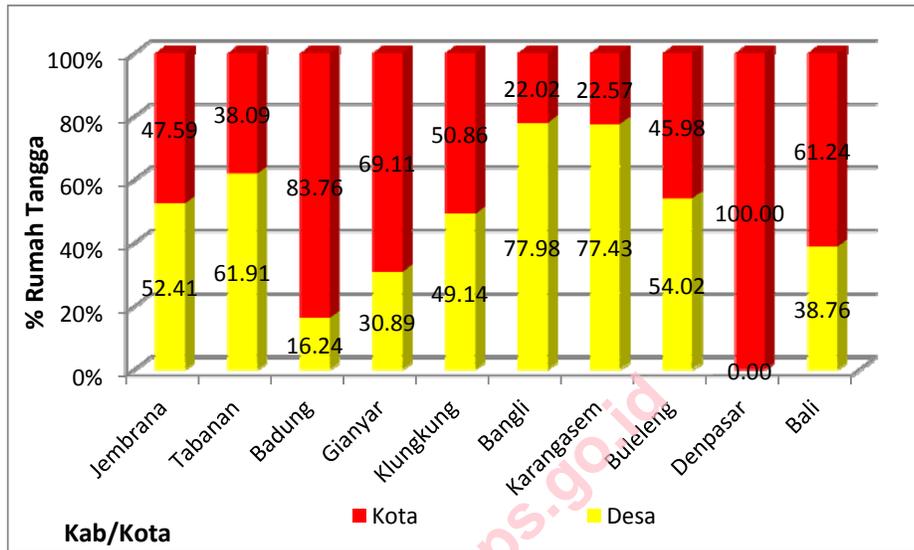
5.1.1. Persebaran Rumah Tangga

Besarnya proporsi rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan di suatu wilayah dapat menggambarkan perbedaan kondisi sosial ekonomi antara daerah perdesaan dan perkotaan. Perbedaan kondisi sosial ekonomi antara daerah perdesaan dan perkotaan inilah yang mengakibatkan adanya daya dorong dari daerah perdesaan dan daya tarik dari daerah tujuan, sehingga berakibat pada terjadinya urbanisasi.

Pada Tahun 2011, persentase rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan di Provinsi Bali adalah sebesar 61,24 persen, sedangkan yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 38,76 persen. Dari proporsi persentase rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan ini memberikan gambaran bahwa perkembangan penduduk Bali mengarah ke wilayah perkotaan. Banyaknya faktor pendorong dan faktor penarik dari

daerah perkotaan menyebabkan terjadinya urbanisasi, sehingga berakibat pada tingginya persentase rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan.

Gambar 5.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal,
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

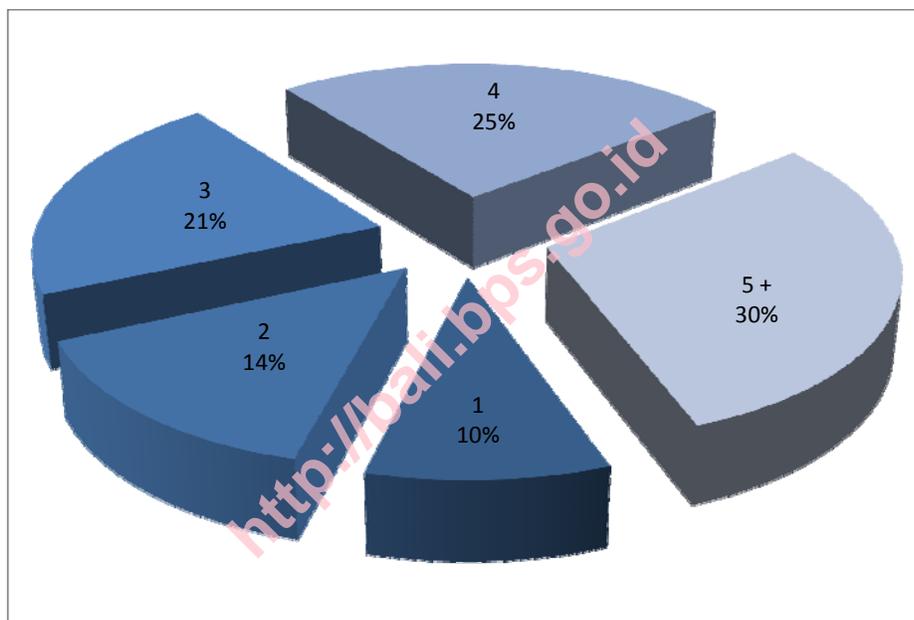
Gambar 5.1. memberikan gambaran mengenai persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota dan daerah tempat tinggal di Provinsi Bali pada Tahun 2011. Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem merupakan dua kabupaten di Provinsi Bali yang lebih dari 75 persen rumah tangganya bertempat tinggal di daerah perdesaan. Persentase rumah tangga Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem yang tinggal di daerah perdesaan masing-masing sebesar 78,18 persen dan 77,44 persen. Sementara wilayah yang persentase rumah tangganya yang bertempat tinggal di daerah perkotaan tinggi selain Kota Denpasar adalah Kabupaten Badung dengan persentase sebesar 83,76 persen.

5.1.2. Jumlah Anggota Rumah Tangga

Jumlah anggota rumah tangga secara umum dapat memberikan gambaran mengenai ukuran rumah tangga. Besar kecilnya ukuran rumah tangga ini memiliki pengaruh terhadap jumlah kebutuhan yang dikonsumsi rumah tangga. Semakin besar ukuran rumah tangga maka semakin besar jumlah kebutuhan konsumsi rumah tangga dan sebaliknya. Pada akhirnya ukuran rumah tangga ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Pada Tahun 2011, rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Provinsi Bali adalah sebesar empat orang. Besaran rata-rata jumlah anggota rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali relatif sama. Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki nilai rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4, hanya Kota Denpasar yang memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 3. Besaran ukuran rumah tangga ini tergolong cukup ideal sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang demografi.

Gambar 5.2.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga,
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011 yang disajikan pada Gambar 5.2. dapat diketahui bahwa masih terdapat 30,09 persen rumah tangga yang jumlah anggota rumah tangganya lebih dari empat orang. Besarnya persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya berjumlah empat dan tiga orang masing masing sebesar 24,89 persen dan 21,13 persen, sedangkan yang jumlah anggota rumah tangganya dua orang sebanyak 14,33 persen. Di sisi lain terdapat 9,57 persen rumah tangga yang merupakan rumah tangga tunggal. Sebagian besar rumah tangga tunggal berada di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng.

5.2. Profil Kepala Rumah Tangga

Kepala rumah tangga adalah seseorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut. Profil karakteristik kepala rumah tangga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Karakteristik kepala rumah tangga yang dapat dihasilkan dari olahan Susenas antara lain jenis kelamin kepala rumah tangga, tingkat pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan kepala rumah tangga, dan kegiatan utama yang dilakukan kepala rumah tangga.

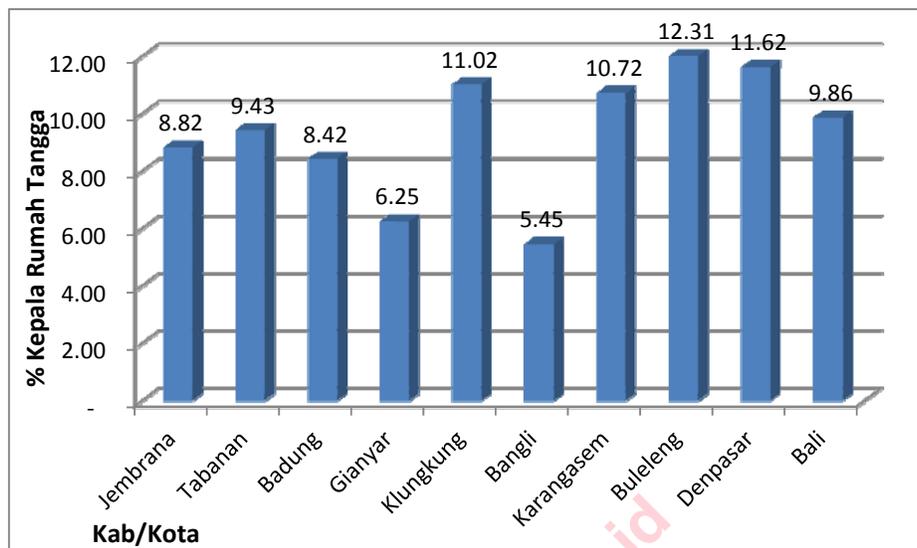
5.2.1. Jenis Kelamin

Masyarakat Bali yang masih menganut sistem patrilineal sebagian besar menganggap bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Anggapan sebagian besar masyarakat inilah yang mengakibatkan adanya kecenderungan laki-laki menyanggah jabatan sebagai kepala rumah tangga.

Di sisi lain, keberadaan kepala rumah tangga perempuan memberikan gambaran mengenai peran ganda yang dijalani para perempuan. Perempuan yang mempunyai fungsi tradisional mengasuh anak dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangga, perlu bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan Gambar 5.3. dapat diketahui bahwa persentase kepala rumah tangga perempuan di Provinsi Bali pada Tahun 2011 adalah sebesar 9,86 persen. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan persentase kepala rumah tangga perempuan tertinggi, yaitu sebesar 12,31 persen, disusul oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung dengan persentase masing-masing sebesar 11,62 persen dan 11,02 persen. Sedangkan kabupaten dengan persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga terkecil di Provinsi Bali adalah Kabupaten Gianyar dengan persentase sebesar 5,45 persen.

Gambar 5.3.
 Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kabupaten/Kota
 Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Tabel 5.1. memberikan gambaran mengenai perkembangan proporsi kepala rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki dan perempuan dalam tiga tahun terakhir. Tabel 5.1 menunjukkan adanya peningkatan proporsi kepala rumah tangga perempuan selama tiga tahun terakhir, dari 8,44 di Tahun 2009 meningkat menjadi 9,34 di Tahun 2010, kemudian menjadi 9,86 di Tahun 2011. Peningkatan persentase kepala rumah tangga perempuan ini secara tidak langsung menunjukkan semakin meningkatnya kemandirian perempuan sehingga berani mengambil resiko untuk hidup sendiri.

Tabel 5.1.
 Persentase Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin,
 Provinsi Bali Tahun 2009 - 2011

Jenis Kelamin	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	91,56	90,66	90,14
Perempuan	8,44	9,34	9,86
Total	100,00	100,00	100,00

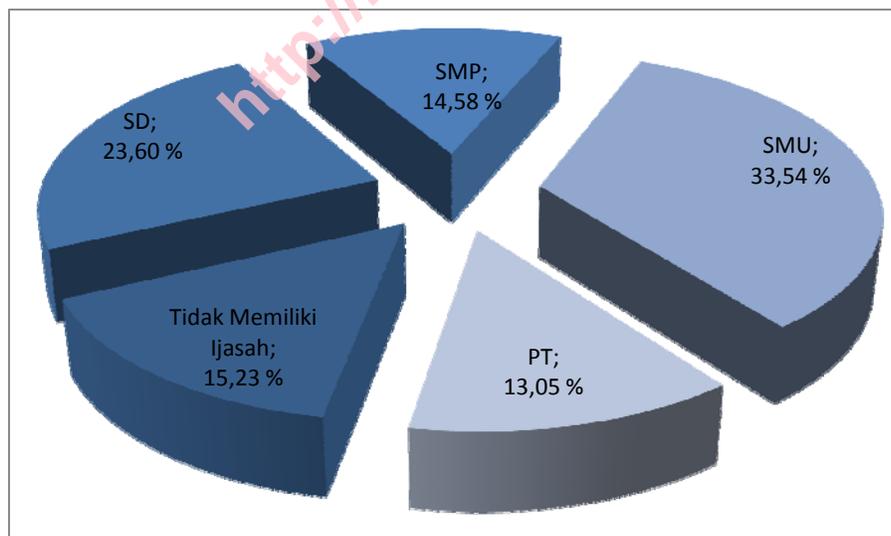
Sumber: Susenas 2009, 2010, 2011

5.2.2. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penduduk yang berpendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang berperan sebagai penanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Hasil data Susenas Tahun 2011 menunjukkan bahwa sebesar 93,47 persen kepala rumah tangga pernah mengikuti pendidikan, ini artinya masih terdapat kepala rumah tangga yang tidak pernah mengikuti pendidikan, yaitu sebesar 6,53 persen. Sebanyak 48,12 persen kepala rumah tangga memiliki ijazah SMU/ sederajat atau perguruan tinggi, dan hanya 23,60 persen kepala rumah tangga yang hanya memiliki ijazah SD/ sederajat. Namun demikian, masih terdapat 15,23 persen kepala rumah tangga yang tidak memiliki ijazah baik karena tidak pernah mengikuti pendidikan maupun karena belum menamatkan pendidikan dasarnya.

Gambar 5.4.
Persentase Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga,
Provinsi Bali Tahun 2011



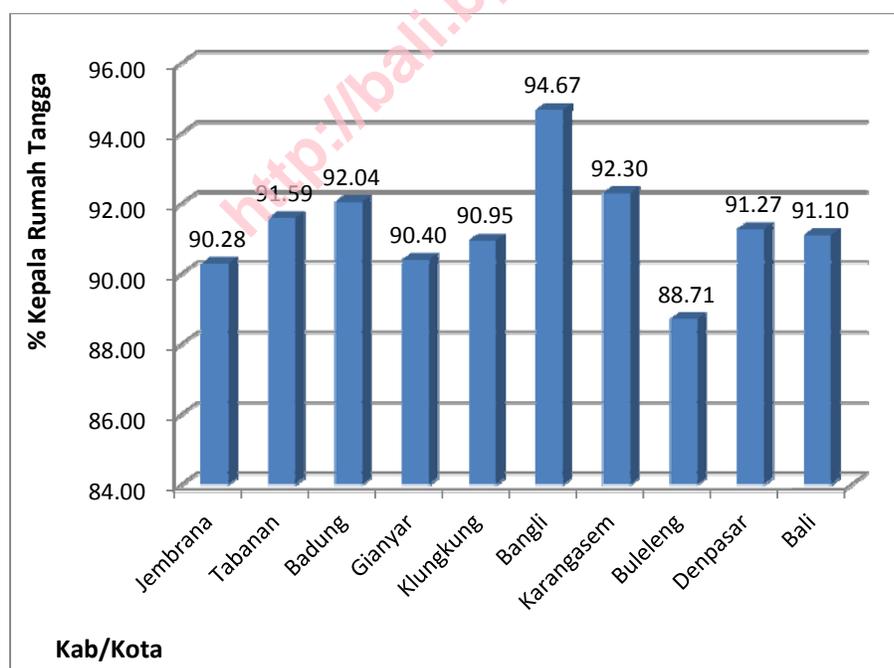
Sumber: Susenas 2011

5.2.3. Kegiatan Utama

Salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga adalah penghasilan rumah tangga. Penghasilan utama sangat erat kaitannya dengan kegiatan utama kepala rumah tangga. Rumah tangga yang kepala rumah tangganya aktif dalam kegiatan ekonomi cenderung memiliki penghasilan yang lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya tidak aktif dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Dari Gambar 5.5. dapat diketahui bahwa persentase kepala rumah tangga yang bekerja di Provinsi Bali pada Tahun 2011 adalah sebesar 91,10 persen. Kabupaten Bangli merupakan kabupaten dengan persentase kepala rumah tangganya bekerja tertinggi, yaitu sebesar 94,67 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang persentase kepala rumah tangganya tidak bekerja tertinggi adalah Kabupaten Buleleng dengan persentase sebesar 88,71 persen.

Gambar 5.5.
Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota,
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

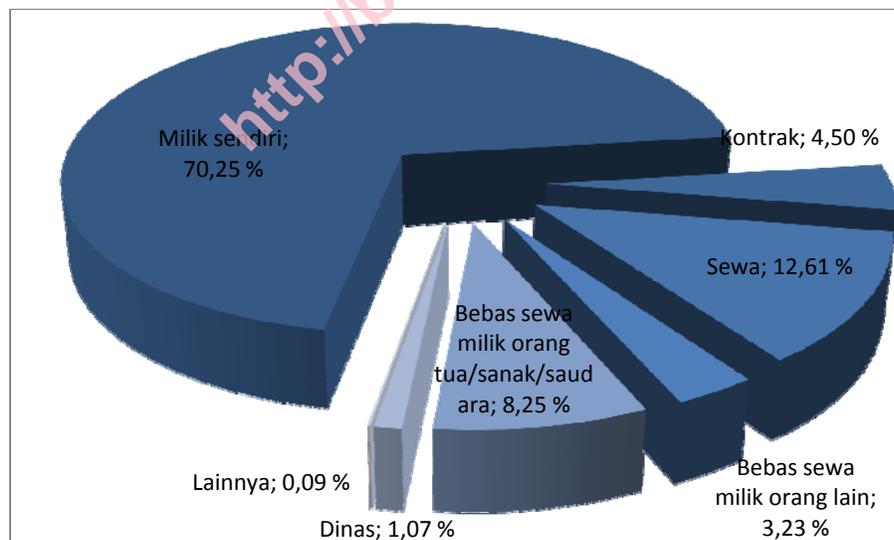
5.3. Perumahan

Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal, sehingga selayaknya rumah memenuhi bentuk fisik dan fasilitas yang memadai. Rumah selain merupakan kebutuhan dasar manusia juga merupakan penentu tingkat kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak tidak lepas dari kondisi dan ketersediaan fasilitas terkait seperti status kepemilikan rumah, kondisi lantai, atap dan dinding rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, akses terhadap teknologi, informasi dan komunikasi, serta bahan bakar utama.

5.3.1. Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan tempat tinggal dapat memberikan gambaran kemampuan ekonomi rumah tangga. Kondisi perekonomian rumah tangga yang status kepemilikan tempat tinggalnya milik sendiri cenderung lebih mampu dibandingkan rumah tangga yang status kepemilikan tempat tinggalnya bukan milik sendiri. Rumah tangga yang status kepemilikan tempat tinggalnya bukan milik sendiri dapat berupa kontrak, sewa, bebas sewa, rumah milik orang tua/sanak/saudara, atau rumah dinas.

Gambar 5.6.
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal,
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

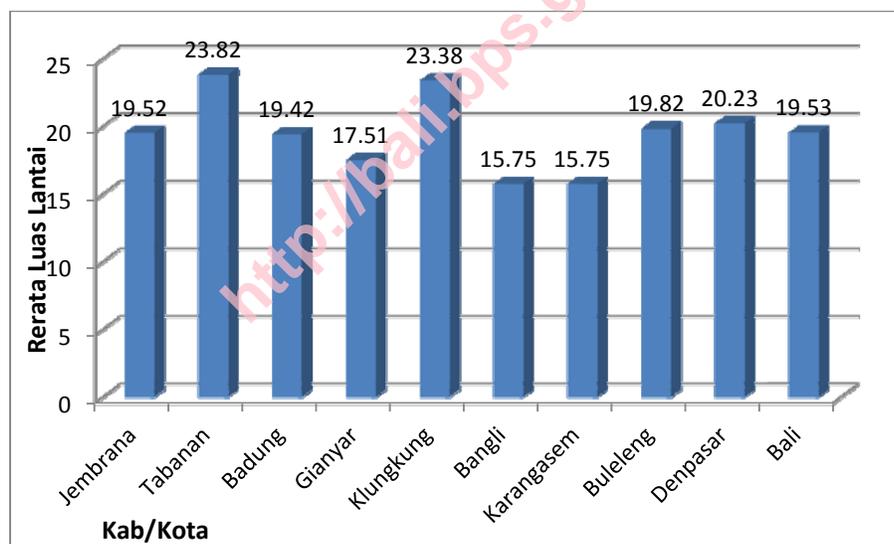
Gambar 5.6. menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Provinsi Bali pada Tahun 2011 (70,25 persen) telah memiliki rumah sendiri. Besarnya persentase status kepemilikan tempat tinggal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bali

cenderung mapan secara ekonomi. Di lain sisi masih terdapat 17,11 persen rumah tangga yang status kepemilikan tempat tinggalnya masih menyewa atau kontrak, sedangkan 12,64 sisanya menempati rumah milik famili/orang lain, rumah dinas, atau lainnya.

5.3.2. Lantai, Atap dan Dinding

Luas lantai dan bahan bangunan tempat tinggal seperti jenis lantai, atap atau dinding merupakan beberapa indikator rumah yang dapat dijadikan ukuran kesehatan dan kemampuan ekonomi rumah tangga. Rumah tangga yang tergolong mampu secara ekonomi cenderung menempati tempat tinggal yang lebih layak huni dibandingkan dengan rumah tangga yang kurang mampu secara ekonomi. Rumah tangga yang menempati tempat tinggal yang layak huni akan secara otomatis meningkatkan kualitas kesehatan anggota rumah tangganya.

Gambar 5.7.
Rata-rata Luas Lantai Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Bali Tahun 2011



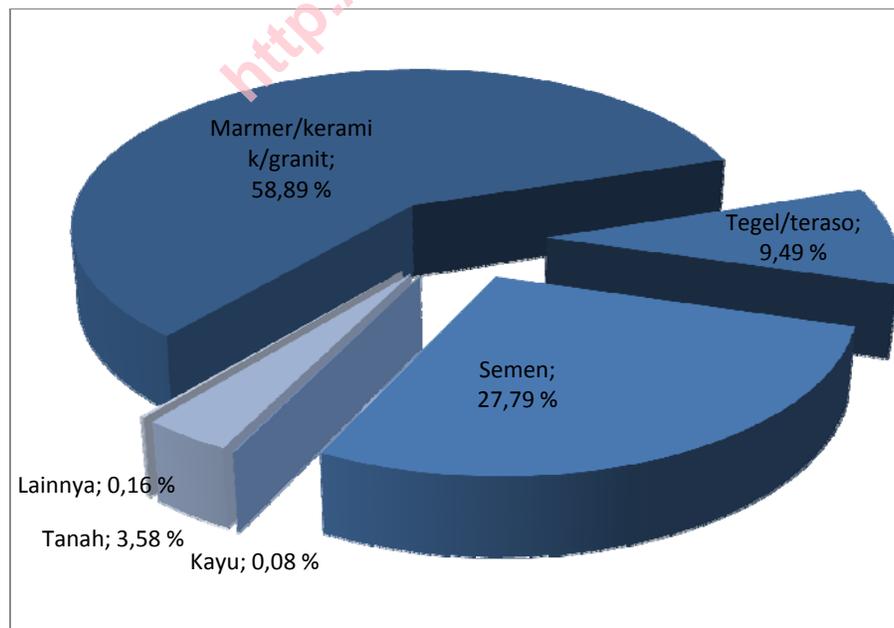
Sumber: Susenas 2011

Luas lantai tempat tinggal merupakan suatu indikator yang menggambarkan kondisi kesehatan rumah tangga. Indikator luas lantai tempat tinggal dapat dikembangkan menjadi luas lantai per kapita dengan membagi luas lantai tempat tinggal dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Bangunan tempat tinggal dikatakan sehat berdasarkan luas lantai per kapita menurut standar WHO dan *American Public Health Association* (APHA) apabila memiliki luas lantai minimal $10 m^2$ per kapita. Bila

dibandingkan dengan standar WHO dan APHA, luas bangunan tempat tinggal rumah tangga di Provinsi Bali pada Tahun 2011 tergolong ke dalam bangunan tempat tinggal sehat. Rata-rata luas lantai per kapita Provinsi Bali Tahun 2011 adalah sebesar $19,53 m^2$. Kabupaten Tabanan dan Klungkung merupakan dua kabupaten yang rata-rata luas lantai per kapitanya terbesar di Provinsi Bali, yaitu masing-masing sebesar $23,82 m^2$ dan $23,38 m^2$. Sedangkan kabupaten dengan rata-rata luas lantai per kapitanya terkecil adalah Kabupaten Bangli dan Karangasem dengan rata-rata sebesar $15,75 m^2$.

Salah satu syarat rumah kesehatan tempat tinggal menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 829 Tahun 2009 adalah jenis lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan. Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011 dapat diketahui bahwa sebagian besar jenis lantai tempat tinggal di Provinsi Bali adalah berjenis marmer/keramik/granit dengan persentase sebesar 58,89 persen diikuti oleh jenis semen sebesar 27,79 persen dan jenis tegel/teraso sebesar 9,49 persen. Hanya 3,58 persen bangunan tempat tinggal yang berjenis lantai tempat tinggal tanah. Dari data ini dapat dikatakan bahwa berdasarkan jenis lantai tempat tinggalnya, sebagian besar rumah tangga di Provinsi Bali pada Tahun 2011 tergolong ke dalam kategori sehat.

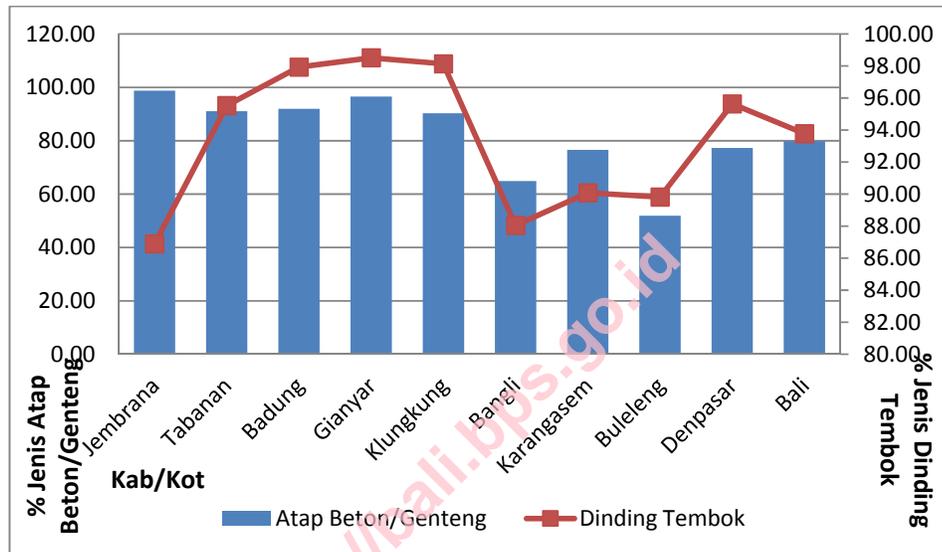
Gambar 5.8.
Persentase Bangunan Tempat Tinggal Menurut Jenis Lantai,
Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Dinding dikatakan dalam kondisi baik apabila dinding tidak lembab dan tidak terpengaruh pencemaran seperti bau, rembesan air kotor serta dilengkapi sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara. Berdasarkan jenis dindingnya, sebagian besar tempat tinggal yang dihuni rumah tangga di Provinsi Bali Tahun 2011 berdinding tembok, yaitu dengan persentase sebesar 93,77 persen.

Gambar 5.9.
Persentase Jenis Atap Beton/Genteng, Jenis Dinding Tembok
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

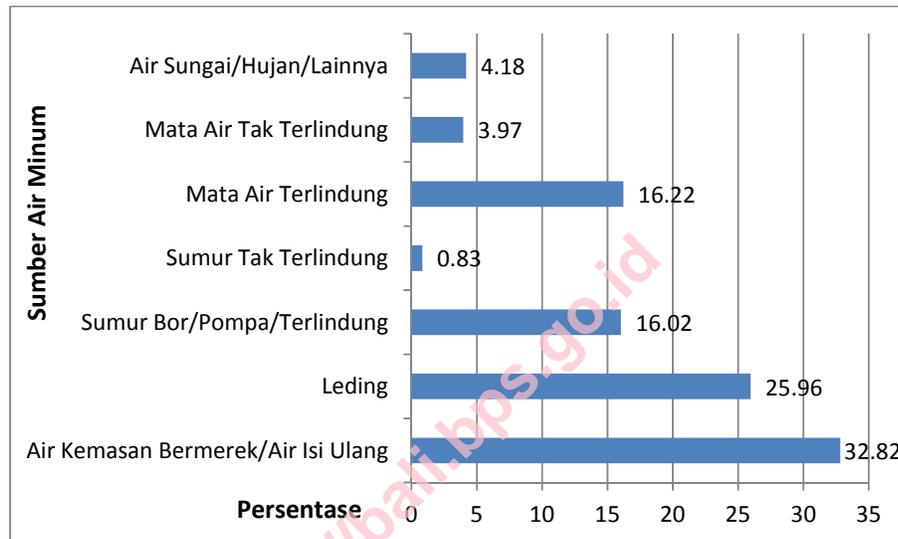
Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011 yang tersaji pada Gambar 5.9. dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 79,85 persen tempat tinggal rumah tangga di Provinsi Bali beratap beton/genteng. Persentase ini menggambarkan tingkat kesehatan bangunan tempat tinggal di Provinsi Bali yang cukup baik berdasarkan jenis atap bangunan tempat tinggal.

5.3.3. Sumber Air Minum

Salah satu ukuran kesehatan rumah tangga adalah ketersediaan fasilitas air minum pada tempat tinggal. Pada umumnya penggunaan fasilitas air minum sendiri lebih menjamin kesehatan, kebersihan, kenyamanan dan kelulasaan penggunaannya dibandingkan fasilitas air minum yang digunakan secara bersama atau umum. Pada Tahun 2011 tercatat sebanyak 55,01 persen rumah tangga di Provinsi Bali memiliki fasilitas sumber air minum sendiri, sedangkan 44,99 persen lainnya menggunakan fasilitas sumber air minum bersama, umum dan tidak memiliki fasilitas sumber air minum.

Air minum yang layak adalah air yang bersumber dari air kemasan, air leding dan air yang berasal dari sumur terlindung. Selain berdasarkan sumbernya, air minum yang layak juga dilihat dari jarak sumber air minum dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Jarak minimal kategori sumber air minum yang sehat apabila jaraknya terhadap penampungan limbah/kotoran/tinja adalah 10 m.

Gambar 5.10.
 Persentase Sumber Air Minum
 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Perubahan gaya hidup menjadi salah satu faktor pendorong untuk bersikap praktis hampir disemua sisi kehidupan termasuk dalam penggunaan air minum. Persentase penggunaan air kemasan bermerek/air isi ulang yang cukup tinggi menggambarkan sikap praktis masyarakat dalam penggunaan air minum. Dari data hasil Susenas Tahun 2011 diketahui bahwa sebanyak 32,82 persen rumah tangga di Provinsi Bali menggunakan air kemasan bermerek/air isi ulang dan 25,96 persen rumah tangga menggunakan air leding sebagai sumber air minumnya. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumur bor/pompa/terlindung sebagai sumber air minumnya adalah sebesar 16,02 persen, sedangkan yang menggunakan mata air terlindung sebesar 16,22 persen. Namun, masih terdapat 8,98 persen rumah tangga yang menggunakan air minum yang bersumber dari sumur/mata air tak terlindung atau air hujan/sungai/lainnya.

Kelayakan air minum berdasarkan jarak sumber air minum dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat menunjukkan sebanyak 66,75 persen rumah tangga sudah memenuhi jarak minimal yang disyaratkan kesehatan. Persentase tersebut

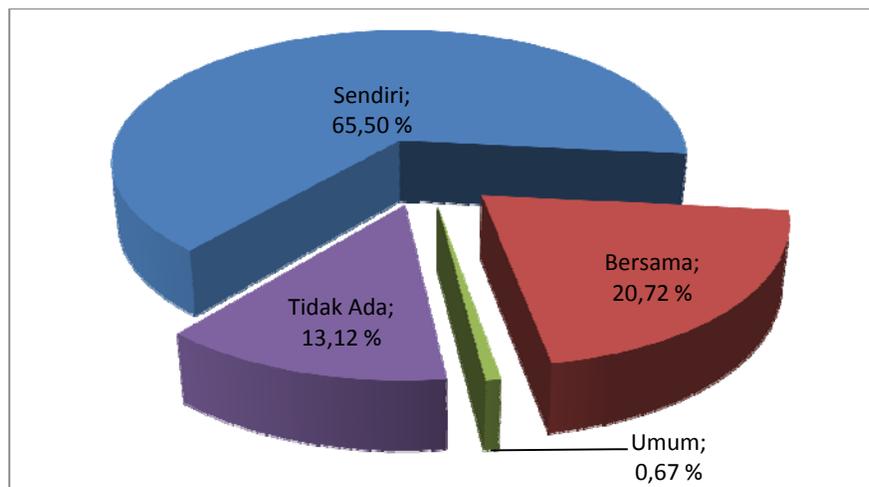
menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelayakan air minum yang dikonsumsi rumah tangga.

5.3.4. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Sanitasi merupakan faktor penting sebagai penentu tingkat kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu tantangan utama bagi negara-negara berkembang. Salah satu sanitasi yang penting adalah fasilitas tempat buang air besar. Rumah sehat tentunya harus memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri dan hanya digunakan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Selain ketersediaan fasilitas tempat buang air besar, kelengkapan tempat penampungan tinja juga menjadi indikator standar kesehatan. Rumah tangga berdasarkan kelengkapan tempat penampungan tinjanya memenuhi standar kesehatan ketika penampungannya menggunakan *septic tank* atau SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah).

Data hasil Susenas Tahun 2011 menunjukkan bahwa di Provinsi Bali terdapat sebanyak 65,50 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Persentase ini menunjukkan cukup tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan penggunaan fasilitas buang air besar. Sementara itu terdapat 20,72 persen rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama-sama, dan 0,67 persen menggunakan fasilitas umum. Namun demikian, masih terdapat 13,12 persen rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tempat buang air besar.

Gambar 5.11.
Persentase Rumah Tangga Menurut Ketersediaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar,
Provinsi Bali Tahun 2011



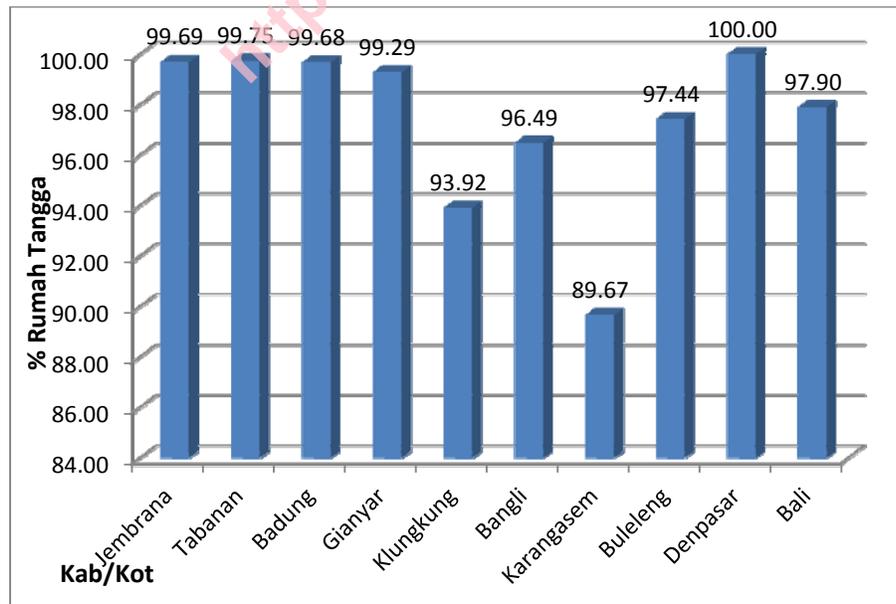
Sumber: Susenas 2011

Dilihat dari fasilitas tempat buang air besarnya, sebagian besar tempat tinggal di Provinsi Bali dapat dikategorikan sebagai tempat tinggal yang layak berdasarkan kelengkapan tempat penampungan tinja. Sebanyak 85,15 persen rumah tangga sudah menggunakan tangki/SPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Namun demikian, terdapat sebanyak 8,60 persen rumah tangga yang tempat pembuangan akhir tinjanya berupa pantai/tanah lapang/kebun, dan 4,38 persen berupa sungai/danau/laut.

5.3.5. Sumber Penerangan

Penerangan yang baik adalah penerangan yang cukup baik tingkat pencahayaannya baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat menerangi seluruh bagian ruangan serta tidak menyilaukan. Listrik merupakan salah satu sumber penerangan yang penggunaannya dapat dikategorikan sebagai penerangan yang baik. Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011 dapat diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga di Provinsi Bali telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan bangunan tempat tinggalnya. Sebesar 98,85 persen rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangannya, dimana 97,70 persen diantaranya merupakan listrik PLN dan 0,95 persen sisanya adalah listrik non PLN.

Gambar 5.11.
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik PLN
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan listrik atau dikenal dengan rasio elektrifitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari sisi ketersediaan infrastruktur. Gambar 5.11. menunjukkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan di Provinsi Bali menurut kabupaten/kota. Seluruh rumah tangga di Kota Denpasar, yang merupakan ibukota Provinsi Bali, sudah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangannya. Sedangkan Kabupaten Karangasem yang letak geografisnya berada di ujung timur Pulau Bali persentase penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangannya baru sebesar 89,67 persen. Pemerataan ketersediaan infrastruktur listrik diharapkan dapat meningkatkan kualitas tempat tinggal rumah tangga berdasarkan sumber penerangan.

5.3.6. Akses Terhadap Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Keterjangkauan akses terhadap teknologi, komunikasi dan informasi saat ini menjadi ukuran modernitas suatu masyarakat. Semakin mudah akses masyarakat terhadap teknologi, komunikasi dan informasi akan semakin maju dan modern masyarakat tersebut. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana teknologi, komunikasi dan informasi menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam rangka pembangunan.

Tabel 5.2.
Indikator TIK Menurut Kabupaten/Kota,
Provinsi Bali Tahun 2011

No	Kabupaten/ Kota	Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi			
		Keberadaan Telepon Rumah (%)	Penguasaan Telepon Selular (%)	Keberadaan Desktop/PC (%)	Keberadaan Laptop/ Notebook (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)
1	Jembrana	4,99	80,43	5,06	9,97
2	Tabanan	8,76	88,32	7,56	13,13
3	Badung	17,14	95,06	14,57	22,75
4	Gianyar	18,86	90,71	9,36	12,31
5	Klungkung	13,66	73,85	5,53	10,23
6	Bangli	3,44	71,89	2,27	3,53
7	Karangasem	2,62	68,41	2,83	4,84
8	Buleleng	7,43	77,73	5,53	8,24
9	Denpasar	25,80	97,28	16,95	30,12
	Bali	13,52	85,59	9,40	15,58

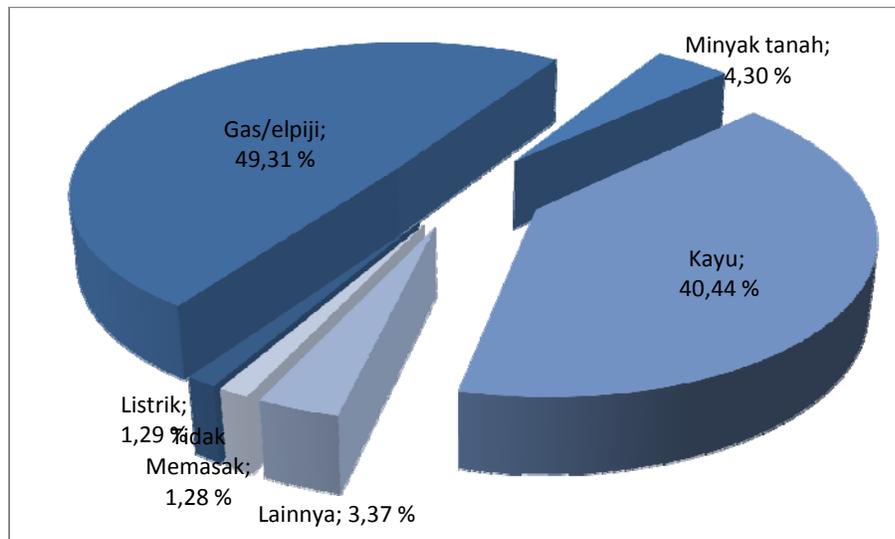
Sumber: Susenas 2011

Pada Tahun 2011 di Provinsi Bali terdapat 13,52 persen rumah tangga yang menggunakan telepon rumah sebagai alat komunikasinya. Kecilnya persentase keberadaan telepon rumah ini mungkin disebabkan oleh kemudahan akses terhadap telepon selular. Hal ini tergambar dari tingginya persentase penggunaan telepon selular di Provinsi Bali pada Tahun 2011 yaitu sebesar 85,59 persen. Di sisi lain, keberadaan dekstop/PC dan laptop/notebook menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberadaan dekstop/PC pada rumah tangga di Provinsi Bali adalah sebesar 9,40 persen, sedangkan keberadaan laptop/PC adalah sebesar 15,58 persen.

5.3.7. Bahan Bakar Utama

Bahan bakar utama merupakan bahan bakar yang paling banyak atau paling sering digunakan rumah tangga untuk keperluan memasak sehari-hari. Terkait dengan MDG's yang salah satu tujuannya adalah menjamin kelestarian lingkungan hidup, maka penggunaan bahan bakar kayu merupakan salah satu target yang harus diturunkan. Selain itu penurunan penggunaan bahan bakar kayu untuk memasak perlu dilakukan karena dampak pembakaran bahan bakar padar cukup berbahaya bagi kesehatan karena memudahkan manusia terkena infeksi pernafasan. Hal ini dimungkinkan karena tipe rumah di Indonesia yang pada umumnya dirancang tanpa cerobong dapur guna saluran pembuangan asap.

Gambar 5.12.
Persentase Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak,
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011

Pada Tahun 2011 persentase rumah tangga yang menggunakan gas/elpiji sebagai bahan bakar utama memasak di Provinsi Bali adalah sebesar 49,31 persen, nilai ini mengalami peningkatan dari 45,58 persen di Tahun 2010. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama menurun dari 41,32 persen di Tahun 2010 menjadi 40,44 di Tahun 2011. Kabupaten Bangli dan Karangasem merupakan dua kabupaten yang persentase rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama tertinggi, masing-masing sebesar 78,07 persen dan 76,59 persen.

<http://bali.bps.go.id>

BAB VI

PENUTUP



6.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, antara lain:

- a. Data kependudukan selain berguna sebagai bahan perencanaan, juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan program pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari masalah-masalah yang berakar pada dinamika penduduk di suatu wilayah.
- b. Jumlah penduduk Provinsi Bali selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan periode 2000 hingga 2011 sebesar 2,15 persen, jumlah penduduk Provinsi Bali berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2011 tercatat sebesar 3.974.689 jiwa yang terdiri dari 2.004.126 laki-laki dan 1.970.564 perempuan.
- c. Penyebaran penduduk di Provinsi Bali Tahun 2011 relatif tidak merata. Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Badung merupakan daerah-daerah pusat pemukiman penduduk. Kota Denpasar yang merupakan ibukota Provinsi Bali dan Kabupaten Badung sebagai daerah satelit, secara karakteristik termasuk daerah perkotaan. Jumlah penduduk yang tinggi di kedua wilayah ini menunjukkan perkembangan penduduk di Propinsi Bali cenderung ke wilayah perkotaan. Dikaitkan dengan luas wilayah, tidak meratanya penyebaran penduduk berimbas pada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.
- d. Angka beban tanggungan penduduk tua terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebaliknya angka beban tanggungan penduduk muda mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian, dominasi angka beban tanggungan masih lebih besar pada beban tanggungan untuk penduduk muda.

- e. Berdasarkan data hasil Susenas 2011, penduduk Bali sedang mengalami transisi dari kelompok *intermediate* ke kelompok penduduk tua. Hal ini ditunjukkan dari nilai umur median penduduk Bali sebesar 30,57 tahun.
- f. Berdasarkan indikator-indikator yang berkaitan dengan kelahiran, seperti rata-rata anak lahir hidup, rasio anak-ibu, umur perkawinan pertama, lama dalam ikatan perkawinan, keluarga berencana, serta tingkat pendidikan wanita pernah kawin terlihat bahwa terjadi pola penurunan tingkat kelahiran. Pada Tahun 2011, rata-rata umur perkawinan pertama wanita usia subur di Provinsi Bali adalah sebesar 21,42 tahun, sedikit meningkat dibandingkan Tahun 2010 yang mencapai umur 21,39 tahun. Persentase wanita usia subur yang sedang menggunakan KB adalah sebanyak 62,58 persen. Tingginya persentase wanita usia subur yang menggunakan KB ini berpengaruh pada penurunan tingkat kelahiran penduduk.
- g. Berdasarkan indikator-indikator yang berkaitan dengan kematian, seperti penolong pertama kelahiran, imunisasi balita, pemberian air susu ibu, serta kesehatan wanita usia subur, terlihat bahwa terjadi pola penurunan tingkat kematian. Peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, serta peningkatan pemahaman akan arti pentingnya kesehatan memberikan dampak pada turunya tingkat kematian.
- h. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Bali sebesar 4 orang. Secara umum kondisi rumah tangga di Bali relatif baik, dimana sebagian besar (91,10 persen) kepala rumah tangga merupakan orang yang aktif bekerja. Di sisi lain tingkat pendidikan kepala rumah tangga juga relatif tinggi. Sebesar 46,59 persen kepala rumah tangga telah memiliki ijasa SMU keatas.
- i. Sebagian besar rumah tangga (70,25 persen) sudah menempati rumah milik sendiri dengan fasilitas perumahan yang relatif mendukung. Sebesar 58,78 persen rumah tangga telah menggunakan air kemasan bermerk dan air leding sebagai sumber air minum utama. Untuk fasilitas buang air besar, sebanyak 65,50 persen rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan penggunaan tangki/SPAL sebagai tempat pembuangan akhirnya sebesar 85,15 persen. Akses terhadap penerangan sangat baik, karena hampir seluruh rumah tangga (89,67 persen) sudah mendapatkan layanan listrik PLN. Akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi relatif baik salah satunya dilihat dari tingginya persentase penduduk yang memiliki telepon selular. Namun yang masih perlu ditingkatkan adalah pemanfaatan komputer dan internet sebagai sumber informasi dan alat bantu komunikasi.

6.2. Saran

Berdasarkan indikator-indikator kependudukan dan kondisi sosial ekonomi yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan direkomendasikan antara lain :

- a. Data kependudukan merupakan data pokok yang diperlukan dalam proses pembangunan, selain berguna sebagai bahan perencanaan, juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan program pembangunan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan data kependudukan yang tepat dan akurat. Selain sensus penduduk, sumber data penduduk yang potensial adalah data registrasi. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan sistem registrasi penduduk, sehingga diperoleh informasi kependudukan yang lebih tepat, akurat dan *up to date*. Selain data pokok kependudukan, data mengenai karakteristik penduduk juga tidak kalah penting. Pendataan karakteristik penduduk seperti Susenas perlu mendapatkan fokus perhatian, dalam rangka peningkatan kualitas data
- b. Keterbatasan sumber daya alam di Pulau Bali mengakibatkan perlunya pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk. Tingkat fertilitas yang tinggi, serta banyaknya jumlah migrasi masuk merupakan dua faktor pendorong terjadinya pertumbuhan penduduk. Melalui pengendalian tingkat fertilitas dan jumlah migrasi masuk diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk.
- c. Perubahan karakteristik penduduk Provinsi Bali yang mengarah pada karakteristik penduduk perkotaan perlu mendapat perhatian pemerintah. Perubahan karakteristik penduduk ini, selain berakibat pada perubahan tradisi, dan pola hidup juga akan berakibat pada kebutuhan sarana, dan prasarana yang diperlukan penduduk.
- d. Peningkatan kuantitas penduduk perlu diimbangi dengan peningkatan kualitasnya, sehingga benar-benar bisa menjadi sumber daya pembangunan yang optimal. Melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemudahan dalam mengakses informasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penduduk.

DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://bali.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar, 80226

Telp. (0361)238159, Fax. (0361) 238162

Home Page: <http://bali.bps.go.id>, Email: bps5100@bps.go.id